

**PENGARUH KONEKSI POLITIK DAN KEPENTINGAN ASING
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK MELALUI
TRANSAKSI PIHAK BERELASI**



TESIS

Disusun oleh:

Muhammad Dzikri Hadiyarroyan (17919013)

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN JUDUL

Pengaruh Koneksi Politik dan Kepentingan Asing terhadap Penghindaran

Pajak melalui Transaksi Pihak Berelasi



TESIS

Disusun oleh:

Muhammad Dzikri Hadiyarroyan (17919013)

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

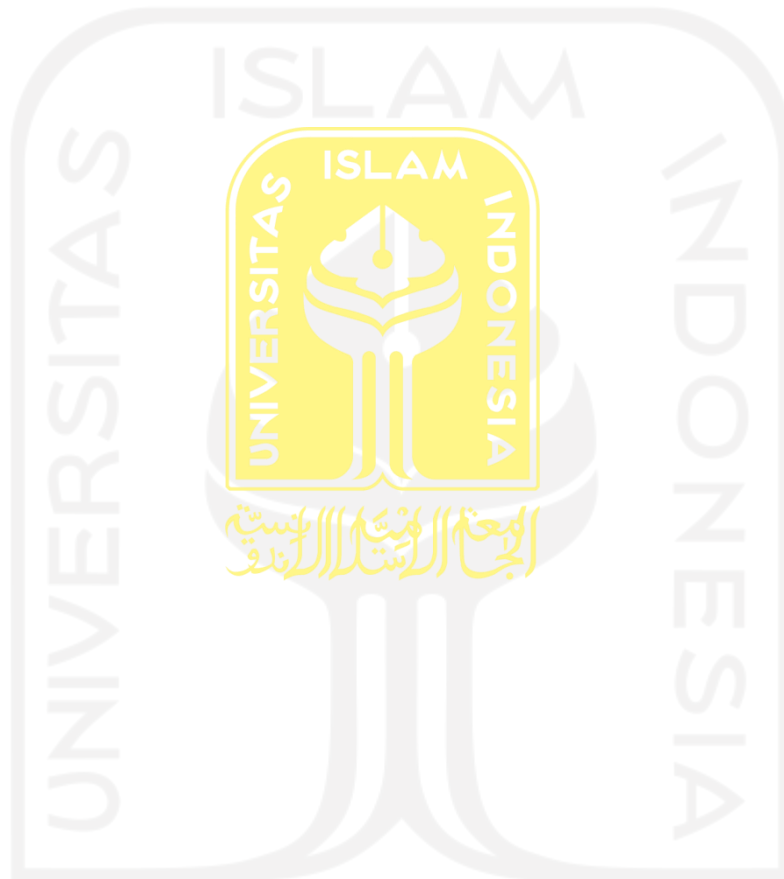
“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar pascasarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 21 Februari 2022



Muhammad Dzikri Hadiyarroyyan

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D., CFrA.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 Program Studi Akuntansi Program Magister,
Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis
yang disusun oleh :

MUHAMMAD DZIKRI HADIYARROYAN

No. Mhs. : 17919013

Konsentrasi : Perpajakan

Dengan Judul:

**PENGARUH KONEKSI POLITIK DAN KEPENTINGAN ASING TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK MELALUI TRANSAKSI PIHAK BERELASI**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D., CFrA.

Penguji II



Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com(IS)., Ph.D., CFrA.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Terkadang menyukai pekerjaan yang sedang dilakukan lebih penting daripada melakukan pekerjaan yang disukai”

Tesis ini saya persembahkan teruntuk:

Ibunda Eksi Widiastuti dan Ayahanda Surtam A. Amin

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah *robbil alamin*, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Pengaruh Koneksi Politik dan Kepentingan Investor Asing terhadap Penghindaran Pajak melalui Transaksi Pihak Berelasi”**. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Magister Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Selama proses penyusunan tesis ini penulis menyadari mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D. selaku Ketua Progran Studi Magister Akuntansi dan sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, kritikan, masukan, nasihat, dan arahan yang sangat bermanfaat sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik;

5. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan, kritik, dan arahan yang sangat membantu dalam perbaikan tesis ini lebih baik lagi;
6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Surtam dan Ibu Eksi Widiastuti, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan kasih sayang kepada penulis hingga saat ini; dan
7. Teman-teman Program Studi Magister Akuntansi UII Angkatan 15 dan semua pihak yang turut membantu peneliti dalam segala hal yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga limpahan nikmat dan karunia Allah SWT selalu menyertai semua pihak yang telah membantu peneliti selama ini. Peneliti sadar bahwa tesis ini tidak terlepas dari kekurangan, maka dari itu saran, kritik dan masukan sangat peneliti harapkan dalam menyempurnakan penulisan tesis ini dan semoga tesis ini bermanfaat serta dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 Februari 2022

Penulis



Muhammad Dzikri Hadiyarroyyan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
BERITA ACARA UJIAN TESIS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Sistematika Penulisan	9
BAB II	11
KAJIAN PUSTAKA	11
2.1. Teori Agensi	11
2.2. Penghindaran Pajak	13
2.3. Koneksi Politik	15
2.4. Kepentingan Asing	16
2.5. Transaksi Hubungan Istimewa	17
2.6. Penelitian Terdahulu	18
2.7. Pengembangan Hipotesis Penelitian	31
2.7.1. Hubungan Koneksi Politik terhadap Transaksi Pihak Berelasi dan Penghindaran Pajak	31
2.7.2. Hubungan Kepentingan Asing terhadap Transaksi Pihak Berelasi dan Penghindaran Pajak	34

2.7.3. Hubungan Transaksi Pihak Berelasi terhadap Penghindaran Pajak dan Peran Transaksi Pihak Berelasi sebagai Mediasi	36
2.8. Kerangka Model Penelitian	39
BAB III.....	40
METODE PENELITIAN	40
3.1 Metodologi.....	40
3.2 Populasi dan Sampel.....	40
3.3 Sumber dan Metode Pengumpulan Data.....	41
3.4 Variabel Operasional Penelitian.....	41
3.5 Variabel Penelitian	42
3.5.1 Penghindaran Pajak.....	42
3.5.2 Transaksi Pihak Berelasi	43
3.5.3 Koneksi Politik.....	44
3.5.4 Kepentingan Asing	45
3.6 Teknik Pengujian dan Hipotesis.....	46
3.6.1 Analisa Statistik Deskriptif.....	46
3.6.2 Analisis <i>Structural Equation Modeling</i> (SEM)	46
3.6.3 <i>Partial Least Square</i> (PLS)	47
3.6.4 Analisa Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	47
3.6.5 <i>Model Fit</i>	49
3.6.6 Analisa Efek Mediasi.....	49
3.6.7 Pengujian Hipotesis	50
3.6.7.1 Analisis Regresi.....	50
3.6.7.2 Hipotesa Operasional	51
BAB IV	54
HASIL DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	54
4.2 Analisis Deskriptif.....	54
4.3 Analisis Model Struktural.....	58
4.4 <i>Model Fit</i>	60
4.5 Pengujian Hipotesis	60
4.6 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis.....	63
4.6.1 Hubungan Koneksi Politik terhadap Transaksi Pihak Berelasi dan Penghindaran Pajak	63

4.6.2 Hubungan Kepentingan Asing terhadap Transaksi Pihak Berelasi dan Penghindaran Pajak	65
4.6.3 Hubungan Transaksi Pihak Berelasi terhadap Penghindaran Pajak dan Peran Transaksi Pihak Berelasi sebagai Mediasi	67
BAB V	70
PENUTUP	70
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Implikasi Penelitian	71
5.3 Keterbatasan dan Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	79



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Realisasi Penerimaan Perpajakan tahun 2014-2020.....	2
Tabel 2.1: Ringkasan Penelitian-Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 4.1: Prosedur Pemilihan Sampel.....	54
Tabel 4.2: Statistik Deskriptif	55
Tabel 4.3: Statistik Deskriptif Variabel Dummy.....	55
Tabel 4.4: Analisis R-Square.....	59
Tabel 4.5: Analisis Q-Square	59
Tabel 4.6: Nilai Koefisien Jalur pada Pengujian Model Struktural.....	60
Tabel 4.7: Nilai Koefisien Jalur Uji Efek Variabel Intervening	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Kerangka Model Penelitian.....	39
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Nama Perusahaan Publik Sampel Penelitian	79
Lampiran 2: Daftar Data Pengukuran dan Variabel Penelitian	83
Lampiran 3: Model Penelitian	115



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh Koneksi Politik dan Kepentingan Asing terhadap Penghindaran Pajak melalui Transaksi Pihak Berelasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2018. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling* yang menghasilkan sampel sebanyak 126 perusahaan. Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Metode analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi jalur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel koneksi politik dan kepentingan asing berpengaruh positif signifikan terhadap transaksi pihak berelasi dan penghindaran pajak. Variabel transaksi pihak berelasi berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak dan variabel transaksi pihak berelasi mampu memediasi pengaruh koneksi politik dan kepentingan asing terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci : *penghindaran pajak, transaksi pihak berelasi, koneksi politik, kepentingan asing.*

ABSTRACT

This study aims to examine and determine the effect of Political Connections and Foreign Interests on Tax Avoidance through Related Party Transactions. The population in this study are manufacturing companies that have been listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013-2018. The sampling technique used is the purposive sampling method which produces a sample of 126 companies. The type of data collected is secondary data. The data analysis method used descriptive statistical analysis and path regression analysis. The results of this study indicate that the variables of political connections and foreign interests have a significant positive effect on related party transactions and tax avoidance. The related party transaction variable has a significant positive effect on tax avoidance and the related party transaction variable can mediate the influence of political connections and foreign interests on tax avoidance.

Keywords : tax avoidance, related party transactions, political connections, foreign interests.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki beberapa sumber pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Berdasarkan informasi APBN tahun 2021, pajak merupakan sumber utama pendapatan APBN di Indonesia. Total anggaran pendapatan negara tahun 2021 ialah sebesar Rp 1.743,6 Triliun yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 1.444,5 Triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 298,2 Triliun, dan Hibah sebesar Rp 0,9 Triliun. Artinya pendapatan yang bersumber dari pajak menyumbangkan sekitar 82,8% dari porsi pendapatan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan dapat mengembangkan strategi terkait proses pemungutan pajak agar pendapatan negara yang berasal dari pajak setiap tahunnya dapat berjalan optimal.

Dalam laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2020 disampaikan bahwa terdapat 46,3 juta wajib pajak yang terdaftar, dari laporan tahunan tersebut juga disampaikan bahwa rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2020 hanya sebesar 77,63%. Data tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat

partisipasi atau kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayarkan pajak. Dengan rendahnya tingkat partisipasi atau kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tentu akan berpengaruh juga terhadap tingkat penerimaan pajak. Berikut data realisasi penerimaan pajak tahun 2014-2020 yang disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1: Realisasi Penerimaan Perpajakan tahun 2014-2020

Tahun	Target	Realisasi	Persentase %
2014	Rp 1.072 Triliun	Rp 985 Triliun	91,9%
2015	Rp 1.294 Triliun	Rp 1.055 Triliun	81,5%
2016	Rp 1.539 Triliun	Rp 1.283 Triliun	83,4%
2017	Rp 1.283 Triliun	Rp 1.147 Triliun	89,4%
2018	Rp 1.424 Triliun	Rp 1.313 Triliun	92,2%
2019	Rp 1.577 Triliun	Rp 1.333 Triliun	84,5%
2020	Rp 1.199 Triliun	Rp 1.072 Triliun	89,4%

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan data tabel di atas, selama 2014-2020 DJP tidak mampu merealisasikan penerimaan negara yang berasal dari perpajakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Fakta tersebut menandakan adanya potensi penerimaan perpajakan yang masih belum bisa dimaksimalkan setiap tahunnya oleh DJP sebagai otoritas pajak di Indonesia. Salah satu penyebab dari terjadinya hal tersebut ialah perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. Pemerintah sangat bergantung pada penerimaan pajak guna mencukupi kebutuhan belanja negara dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan, mayoritas wajib pajak

terutama perusahaan memiliki kebijakan untuk melakukan perencanaan atau manajemen pajak agar beban pajaknya dapat diminimalkan.

Pada awal tahun 2016, *The International Consortium of Investigative Journalists* (ICIJ) mengeluarkan sebuah dokumen rahasia yang bernama “*The Panama papers*”. *The Panama papers* yang berisikan 11,5 juta data dokumen rahasia dibuat oleh sebuah firma hukum Mossack Fonseca dari negara Panama. Dokumen tersebut memuat daftar klien yang menggunakan jasa perusahaan dalam hal pembentukan perusahaan baru, dan pengelolaan asset di luar negeri. Munculnya dokumen *Panama papers* ini juga membuktikan bahwa masih tingginya aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan sejumlah wajib pajak. Hal tersebut sangat bertentangan dengan upaya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak negara. Selain itu, dokumen *Panama papers* cukup menarik perhatian publik karena dokumen tersebut berisikan nama sejumlah perusahaan, konglomerat, dan pejabat tinggi dari berbagai negara yang diduga melakukan penghindaran pajak, termasuk ada beberapa yang berasal dari Indonesia.

Tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak disebut juga dengan *tax aggressiveness* (Kim & Zhang, 2016). *Tax aggressiveness* dilakukan dalam rangka untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan (*lawful*) dan diikuti dengan pengungkapan informasi penuh kepada otoritas pajak. Hal tersebut berbeda dengan *tax evasion*, yang dilakukan dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (*unlawful*)

(Hidayati & Diyanty, 2018). Penggunaan istilah agresivitas pajak (*tax aggressiveness*) dapat digunakan bergantian dengan istilah penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Chen, Dyreng & Li, 2018).

Penghindaran pajak merupakan suatu isu yang masih belum terpecahkan dalam praktik perpajakan di berbagai negara termasuk Indonesia. Dilatarbelakangi oleh kasus *Panama papers* yang berisikan daftar nama perusahaan, konglomerat, dan pejabat tinggi dari Indonesia, membuat dugaan adanya penghindaran pajak yang masih tinggi (Ferdiawan & Firmansyah, 2017). Artinya sangat memungkinkan pendapatan pajak Indonesia tidak optimal dikarenakan adanya tindakan *profit shifting* dalam menghindari beban pajak (Meinarto, 2018; Refgia, 2017; Sundari & Susanti, 2016). Berdasarkan kasus tersebut peneliti berasumsi bahwa adanya pengaruh pihak asing dan pihak yang dekat dengan pemerintahan (politisi) dalam praktik penghindaran pajak.

Koneksi politik dapat didefinisikan sebagai kedekatan antara pelaku bisnis dengan pemerintah atau pelaku bisnis dengan politisi, termasuk di Indonesia. Hal tersebut sengaja dilakukan untuk memudahkan akses bisnis mereka terkait dengan berbagai hal, termasuk dalam kepentingan perpajakan perusahaan (Hidayati & Diyanty, 2018). Koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan dapat melindungi mereka dari risiko terdeteksi saat melakukan tindakan pajak agresif atau penghindaran pajak (Kim & Zhang, 2016). Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik lebih cenderung melakukan agresivitas pajak, yang artinya koneksi politik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

perusahaan (Kim & Zhang, 2016; Wahab, dkk., 2017; Lin, dkk., 2017; Ferdiawan & Firmansyah, 2017). Namun, Dharma dan Ardiana (2016) menyatakan tidak ada pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak. Sementara, Pranoto dan Widagdo (2015) menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Kepentingan asing (*foreign's interest*) pada suatu perusahaan Indonesia juga berpotensi menjadi penyebab dari praktik penghindaran pajak, salah satunya dengan melalui *profit shifting*. Penelitian terdahulu terkait dengan kepentingan investor asing dalam sebuah perusahaan yang dilakukan oleh Salihu, dkk. (2015), Ferdiawan dan Firmansyah (2017), dan Idzni dan Purwanto (2017) menghasilkan kesimpulan bahwa kepemilikan asing yang tinggi akan cenderung memotivasi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Namun penelitian mereka bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andikaningprang, dkk. (2017), Rusydi dan Martani (2014), dan Purnomo (2016) yang dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Transaksi pihak berelasi (*related party transactions*) atau transaksi hubungan istimewa dapat dikategorikan sebagai salah satu praktik penghindaran atau agresivitas pajak jika perusahaan melakukan transaksi pihak berelasi dengan tujuan untuk meminimalkan beban atau menghilangkan sebagian beban pajaknya (Zubaidah & Satyawan, 2015). Sejalan dengan hal tersebut, Cristea dan Nguyen (2017) menyatakan bahwa dari perspektif pemerintah, penyebab pemerintah kehilangan potensi dalam

penerimaan pajak adalah penentuan harga atas transaksi pihak berelasi (*transfer pricing*) yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mayoritas perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan asing akan mengalihkan keuntungannya dari negara-negara yang memungut pajak dengan tarif yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang memungut pajak dengan tarif yang lebih rendah (*low tax countries*). Park (2018) dan Zubaidah dan Satyawan (2015) menyatakan bahwa praktik *related party transactions* berpengaruh positif terhadap perilaku agresivitas pajak perusahaan. Hal tersebut berarti semakin tinggi jumlah transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan oleh perusahaan akan cenderung meningkatkan peluang untuk melakukan penghindaran pajak. Sedangkan, Panjulusman, dkk. (2018) mendapatkan kesimpulan yang berbeda yaitu *related party transactions* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini memadukan beberapa variabel yang memiliki hasil tidak konsisten terhadap penghindaran pajak yaitu koneksi politik, kepentingan asing, dan transaksi pihak berelasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini, fokus yang ditekankan adalah transaksi pihak berelasi dalam memediasi pengaruh koneksi politik dan kepentingan asing terhadap penghindaran pajak. Penelitian-penelitian sebelumnya hanya menguji secara parsial hubungan antar variabel di atas. Penelitian ini menggunakan model dengan variabel transaksi pihak berelasi dalam memediasi pengaruh koneksi politik dan kepentingan asing terhadap penghindaran pajak dengan permasalahan yang berbeda sehingga dapat mengisi

kekosongan referensi yang berkaitan dengan tema tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini penulis tergerak untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Koneksi Politik dan Kepentingan Asing terhadap Penghindaran Pajak melalui Transaksi Pihak Berelasi”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap transaksi pihak berelasi?
2. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah kepentingan asing berpengaruh terhadap transaksi pihak berelasi?
4. Apakah kepentingan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
5. Apakah transaksi pihak berelasi berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
6. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan dimediasi oleh transaksi pihak berelasi?
7. Apakah kepentingan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan dimediasi oleh transaksi pihak berelasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini untuk menguji dan mengetahui bagaimana pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen yaitu sebagai berikut:

1. Menguji dan memberikan bukti empiris bahwa koneksi politik mempengaruhi transaksi pihak berelasi.
2. Menguji dan memberikan bukti empiris bahwa koneksi politik mempengaruhi penghindaran pajak.
3. Menguji dan memberikan bukti empiris bahwa kepentingan asing mempengaruhi transaksi pihak berelasi.
4. Menguji dan memberikan bukti empiris bahwa kepentingan asing mempengaruhi penghindaran pajak.
5. Menguji dan memberikan bukti empiris bahwa transaksi pihak berelasi mempengaruhi penghindaran pajak.
6. Menguji dan memberikan bukti empiris bahwa koneksi politik mempengaruhi penghindaran pajak melalui transaksi pihak berelasi.
7. Menguji dan memberikan bukti empiris bahwa investor asing mempengaruhi penghindaran pajak melalui transaksi pihak berelasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Dilakukannya penelitian dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak terkait, antara lain:

1. Bagi Otoritas Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia untuk membuat regulasi baru terkait penghindaran pajak yang

dilakukan oleh wajib pajak badan dan dapat meminimalisir praktik penghindaran pajak.

2. Aspek Teoritis dan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah dan memperluas literatur yang berkaitan dengan variabel penelitian. Hasil penelitian dapat dijadikan pengembangan referensi dan mengisi kekosongan referensi yang berkaitan dengan transaksi pihak berelasi dalam memediasi pengaruh koneksi politik dan kepentingan asing terhadap penghindaran pajak.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian dari praktik penghindaran pajak. Bab ini juga menjelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan beberapa konsep yang akan digunakan dalam penelitian, kemudian selanjutnya dikaitkan dengan teori yang menghubungkan setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam bab ini juga tertuang kerangka penelitian dalam bentuk gambar yang menguraikan pengaruh variabel koneksi politik dan kepentingan asing terhadap penghindaran pajak melalui transaksi pihak berelasi.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian ini dilaksanakan yang terdiri dari rencana penelitian, penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*, metode pengumpulan data, teknik analisis data serta definisi operasional masing-masing variabel. Objek penelitian ini akan berfokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.

BAB IV: DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan objek penelitian, analisis data serta interpretasi dari hasil penelitian. Bab ini juga memberikan jawaban terhadap tujuan penelitian dan pembahasan tentang pengaruh variabel koneksi politik dan kepentingan asing terhadap penghindaran pajak melalui transaksi pihak berelasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian ini yang merupakan intisari dari hasil penelitian dan merupakan jawaban masalah dan tujuan penelitian. Selain itu pada bab ini juga dilengkapi dengan kontribusi dan implikasi hasil penelitian pada beberapa aspek seperti bidang teoritis dan praktisi. Selanjutnya saran dari penelitian ini merupakan hal yang dianjurkan sebagai penerapan dari penelitian kepada penelitian selanjutnya untuk memperkaya referensi dan untuk masyarakat luas.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Teori Agensi

Setiap perusahaan memiliki suatu tujuan tertentu dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dan tidak dapat terlepas dari tujuan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di sekitarnya. Teori keagenan berfokus pada penjelasan dua pelaku ekonomi yang memiliki perbedaan tujuan yaitu *principal* dan *agent*. Hubungan keagenan adalah suatu kontrak satu pihak yang memiliki kuasa tertinggi (*principal*) dan pihak lain sebagai objek dari penguasa (*agent*) dalam melakukan tindakan yang sesuai dengan harapan *principal* (Jensen & Meckling, 1976). Jika *principal* merasa bahwa *agent* memiliki tujuan yang sama, maka *agent* akan bertindak sesuai yang diharapkan oleh *principal*. Namun terjadi pertentangan apabila *agent* tidak menjalankan perintah *principal* karena memiliki tujuan untuk kepentingan pribadi. Keadaan tersebut memunculkan *gap* yang dinamakan *agency conflict*.

Teori agensi menjelaskan tentang adanya konflik keagenan yang terjadi antara *principal* dan *agent* karena *agent* memiliki tujuan yang berbeda untuk kepentingan sendiri. Messier, Glover, dan Prawit (2014) menyatakan pendapatnya mengenai hubungan keagenan yang memiliki dua pokok permasalahan yaitu:

1. Terjadinya konflik kepentingan karena perbedaan tujuan antara manajer dan *principal*

2. Terjadinya informasi asimetri dimana manajer dianggap memiliki informasi yang lengkap terhadap posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya dibandingkan dengan *principal*.

Konflik kepentingan terjadi karena apa yang diharapkan oleh *stakeholder* bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh manajer perusahaan. *Stakeholder* yaitu pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan salah satunya adalah pemerintah. Pemerintah bertindak sebagai *principal* dengan kepentingan untuk memungut pajak terhadap perusahaan sesuai dengan peraturan undang-undang (Sandy & Lukviarman, 2015). Pajak yang dibayarkan merupakan suatu kewajiban perusahaan kepada negara karena pada hakikatnya perusahaan adalah bagian dari suatu negara dan wajib berkontribusi untuk perekonomian dengan cara patuh membayar pajak. Penghindaran pajak terjadi karena adanya perbedaan tujuan perusahaan yang menganggap bahwa pajak adalah beban yang harus diefisiensikan. Sedangkan menurut pemerintah pajak adalah pendapatan negara terbesar sehingga harus dioptimalisasikan. Hal tersebut menimbulkan konflik agensi antara pemerintah dan perusahaan (Sandy & Lukviarman, 2015).

Agency Problem II merupakan bagian dalam teori keagenan yang menjelaskan dua konsep kepemilikan yaitu *entrenchment effect* dimana tindakan pemegang saham pengendali dengan hak kontrol yang kuat memiliki kecenderungan untuk mementingkan kepentingan pribadi mereka dengan mengontrol perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham non pengendali (Sanjaya, 2010). Hal ini

menyiratkan adanya *entrenchment effect* yang ditimbulkan pemegang saham pengendali. Konsep *alignment effect* dimana pemegang saham pengendali memiliki hak aliran kas yang cukup untuk mencegah keinginan mereka untuk mengambil alih pemegang saham non pengendali dan perusahaan (Sanjaya, 2010). *Alignment* adalah tindakan pemegang saham pengendali yang sinkron dengan kepentingan pemegang saham non pengendali.

Teori agensi yang berkaitan dengan pemegang saham pengendali dan non pengendali tentu berkaitan juga dengan struktur kepemilikan dikarenakan adanya kelompok kepemilikan saham dalam sebuah perusahaan (Purnomo, 2016). Kepemilikan tersebut dapat dalam bentuk kepemilikan pemerintah dan asing sehingga ketika terdapat kepemilikan secara dominan dapat mempengaruhi keputusan yang diambil karena pemegang saham pengendali dapat mengontrol perusahaan dan dapat mempengaruhi agen untuk melakukan apa yang menjadi keinginan *principal*.

2.2. Penghindaran Pajak

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan, definisi pajak menurut Soemitro & Sugiharti (2014) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat

jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Tidak adanya kontraprestasi langsung tersebut menyebabkan perusahaan atau wajib pajak cenderung melakukan manajemen pajak untuk menghemat atau memperkecil pajaknya (Oktavia & Martani, 2013). Terdapat beberapa istilah yang populer dalam kaitannya dengan manajemen pajak, di antaranya ialah penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan agresivitas pajak (*tax aggressiveness*).

Tax avoidance didefinisikan sebagai upaya untuk mengurangi besaran jumlah pajak terutang secara legal dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan pajak atau dengan kata lain tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Pohan, 2013). Pada dasarnya, keputusan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tergantung dari pertimbangan biaya dan manfaat yang mungkin akan diperoleh perusahaan dari melakukan kegiatan tersebut. Di lain sisi, dalam praktiknya perbedaan antara manajemen pajak dan penggelapan pajak (*tax evasion*) menjadi sangat tipis karena seringkali wajib pajak yang awalnya hanya ingin melakukan manajemen pajak secara tidak sadar menjadi melakukan kegiatan penggelapan pajak (Hidayati & Diyanty, 2018).

Adanya suatu tindakan *tax avoidance* tidak terlepas dari konsekuensi logis yang timbul dari masih banyaknya celah-celah atau kelemahan di peraturan perpajakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (Ginting, 2016). Hal tersebut menjadi permasalahan bagi DJP selaku otoritas pajak karena dengan semakin banyaknya wajib pajak yang dapat memanfaatkan celah atau kelemahan di ketentuan perpajakan tersebut

akan mengakibatkan penurunan penerimaan negara yang berasal dari pajak. Penurunan penerimaan perpajakan tersebut tentu akan sangat merugikan bagi negara karena lebih dari 85% sumber pendapatan APBN di Indonesia berasal dari sektor pajak.

2.3. Koneksi Politik

Perusahaan yang mempunyai koneksi politik merupakan perusahaan atau pemilik atau direksi perusahaan yang memiliki hubungan kedekatan dengan pemerintah (Pranoto & Widagdo, 2015). Kedekatan hubungan dengan pemerintah dapat juga diartikan sebagai perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu perusahaan yang berbentuk BUMN atau BUMD. Pemilik perusahaan yang mempunyai kedekatan hubungan dengan pemerintah dapat juga merupakan konglomerat atau pemilik perusahaan yang juga berprofesi sebagai tokoh politik (Habib et al., 2017). Tokoh politik tersebut contohnya memiliki jabatan sebagai anggota dewan di pemerintahan pusat atau merupakan petinggi partai politik. Dengan kata lain, koneksi politik merupakan tingkat kedekatan hubungan perusahaan dengan pemerintah.

Sudibyo dan Jianfu (2017) berpendapat bahwa koneksi politik dipercaya akan menjadi suatu fasilitas yang sangat berharga bagi perusahaan. Beberapa keuntungan yang mungkin akan banyak didapatkan oleh perusahaan yang berkoneksi politik adalah kemudahan dalam birokrasi perizinan, pembiayaan hutang, fasilitas pajak, dan kekuatan pasar yang lebih kuat. Hanny dan Niandari (2018) memberikan gambaran bahwa bank-bank sering dipaksa untuk memberikan pinjaman bagi proyek-proyek

yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki koneksi politik walaupun proyek tersebut diperkirakan tidak menguntungkan.

2.4. Kepentingan Asing

Perusahaan yang struktur kepemilikannya terdiri atas kepemilikan asing dari perorangan ataupun instansi, mencerminkan bahwa adanya kepentingan investor asing pada perusahaan tersebut (Salihu et al., 2015). Perusahaan dengan kepemilikan asing atau yang terkait dengan pihak asing diinginkan bagi mayoritas negara berkembang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat karena diyakini memiliki kinerja yang unggul dan produktivitas yang tinggi (Idzni dan Purwanto, 2017). Investor asing yang memegang saham paling sedikit 20% dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan atau disebut juga sebagai pemegang saham pengendali asing. Mayoritas pemegang saham pengendali asing dalam sebuah perusahaan dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi akan lebih mementingkan kesejahteraan pribadinya (Park, et al., 2016).

Banyaknya arus masuk investasi asing berupa *Foreign Direct Investment* (FDI) maupun *Foreign Portfolio Investment* (FPI) ke negara-negara berkembang menjadi suatu kekhawatiran karena adanya kesempatan untuk melakukan aktivitas *profit shifting* di berbagai cabang perusahaan multinasional lainnya. *Profit shifting* adalah pemindahan laba dari negara dengan tingkat pajak yang tinggi ke negara dengan tingkat pajak yang lebih rendah (Richardson et al., 2017).

2.5. Transaksi Hubungan Istimewa

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 18 Ayat 4 menyebutkan bahwa hubungan istimewa dianggap ada apabila: (1) Hubungan antara dua atau lebih Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25%; (2) Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung dengan Wajib Pajak lainnya; (3) Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda. Dalam penjelasan PSAK No. 7, yang dimaksud transaksi hubungan istimewa adalah suatu pengalihan berupa sumber daya, jasa ataupun kewajiban antara entitas yang menyiapkan laporan keuangan (pelapor) dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, terlepas apakah ada harga yang dibebankan.

Kebijakan dalam menetapkan harga transaksi hubungan istimewa atau *transfer pricing* digunakan oleh perusahaan yang terdiri dari beberapa divisi, divisi-divisi dalam suatu perusahaan tersebut melakukan penyerahan barang atau jasa dari satu divisi ke divisi lainnya dengan tujuan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja divisi (Muhammadi et al., 2016). Sedangkan, Gunadi (2012) mengartikan *transfer pricing* sebagai sesuatu yang negatif karena penentuan harga transaksi hubungan istimewa tersebut dapat dimanipulasi untuk mengurangi laba dari salah satu anggota grup perusahaan dan kemudian melaporkan perusahaan tersebut seolah-olah rugi agar terhindar dari kewajiban perpajakan di negara tersebut. Oleh karena itu, dapat

disimpulkan bahwa transaksi hubungan istimewa atau *transfer pricing* dapat memiliki dua tujuan yang berbeda yaitu untuk penilaian kinerja dan menghindari pajak perusahaan.

2.6. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh wajib pajak badan/perusahaan. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Habib et al. (2017) yang meneliti tentang pengaruh koneksi politik terhadap manajemen laba melalui mekanisme *related party transactions*, penelitian Wahab et al. (2017) yang meneliti tentang pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance* dengan dimoderasi oleh *corporate governance*, penelitian Salihu et al. (2015) yang meneliti tentang pengaruh kepentingan asing terhadap penghindaran pajak, dan penelitian (Park, 2018) yang meneliti tentang pengaruh *related party transactions* terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini tertarik untuk meneliti sejauh mana pengaruh koneksi politik dan kepentingan asing terhadap penghindaran pajak melalui mekanisme transaksi hubungan istimewa (*transfer pricing*). Adapun ringkasan penelitian terdahulu dalam penelitian ini disajikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1: Ringkasan Penelitian-Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Teori, Metode, Sampel, dan Alat Uji	Hasil
1	Rusydi dan Martani (2014)	Independen: - Struktur kepemilikan (kepemilikan keluarga, asing, dan negara) Dependen: - Aggressive tax avoidance	- Teori: - Agensi - Metode Kuantitatif - Sampel: 91 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2012 - Alat analisis: regresi - Alat Uji: EvIEWS v.6	- Kepemilikan keluarga berpengaruh negative terhadap aggressive tax avoidance - Sedangkan kepemilikan asing dan negara tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
2	Kiswanto dan Purwaningsih (2014)	Independen: - Pajak - Kepemilikan asing - Ukuran perusahaan Dependen: - Transfer pricing	- Teori: - Agensi - Metode Kuantitatif 125 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2013 - Alat analisis: regresi linier berganda - Alat Uji: SPSS v.16	- Pajak berpengaruh positif terhadap transfer pricing. - Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap transfer pricing - Ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap transfer pricing
3	Salihu, dkk. (2015)	Independen: Kepentingan investor asing (porsi total kepemilikan investor asing, kepemilikan asing kurang dari 5%, porsi direksi asing)	- Teori: - Legitimasi - Metode Kuantitatif - Top 100 Index bursa Malaysia periode 2009-2011. Final sampel: 63	Hubungan positif signifikan antara kepentingan investor asing dan penghindaran pajak perusahaan.

No.	Peneliti	Variabel	Teori, Metode, Sampel, dan Alat Uji	Hasil
		Dependen: • <i>Tax avoidance</i>: (Effective Tax Rate (ETR), Cash Effective Tax Rate (CETR), ratio of total tax expense to operating cash flow, ratio of tax paid to operating cash flow)	perusahaan, 189 firm-year observations • Alat Uji: Eviews	
4	Zubaidah dan Satyawati (2015)	Independen: • Transaksi hubungan istimewa; transaksi penjualan, pembelian, dan pinjaman Dependen: • <i>Tax avoidance</i>: ETR	• Teori: - Agensi - Akuntansi Positif - Kepatuhan • Metode Kuantitatif • 104 perusahaan non keuangan di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015 • Alat analisis: regresi linier berganda • Alat Uji: SPSS	- RPT sales dan loan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. - Sedangkan RPT pembelian berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
5	Kim dan Zhang (2016)	Independen: • Aktivitas politik perusahaan: direksi perusahaan yang berasal dari politisi, kontribusi	• Teori: - Agensi • Metode Kuantitatif • Perusahaan publik di Amerika periode 1999 to	- Perusahaan dengan koneksi politik lebih melakukan agresivitas pajak dibanding dengan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik.

No.	Peneliti	Variabel	Teori, Metode, Sampel, dan Alat Uji	Hasil
		kampanye dari perusahaan. Dependensi: Tax aggressiveness: (DTAX, SHELTER, ETR)	2009. Final sample: 32.898 firm-year observation - Alat analisis: ordinary least squares (OLS) - Alat Uji: Eviews	
6	Pranoto dan Widagdo (2015)	Independensi: - Koneksi politik: (kepemilikan pemerintah yang dihitung melalui proporsi saham pemerintah di perusahaan & komisaris independen menggunakan dummy) - CG: <i>corporate governance</i> indeks Dependensi: - Tax aggressiveness: ETR	- Teori: - Agensi - Metode Kuantitatif - Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006-2014. Sampel: 175 perusahaan - Alat analisis: regresi linier berganda - Alat Uji: SPSS	- Koneksi politik dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. - Sedangkan <i>corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
7	Sundari dan Susanti (2016)	Independensi: - Pajak - Kepemilikan asing - Mekanisme bonus <i>Debt covenant</i> Dependensi:	- Teori: - Akuntansi Positif - Metode Kuantitatif 111 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2014	- Pajak dan kepemilikan asing memiliki dampak positif yang signifikan pada keputusan perusahaan untuk mentransfer harga.

No.	Peneliti	Variabel	Teori, Metode, Sampel, dan Alat Uji	Hasil
		<i>Transfer pricing</i>	- Alat analisis: <i>logistic regression</i> - Alat Uji: SPSS	Sementara rencana bonus dan perjanjian utang tidak secara signifikan mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mentransfer harga.
8	Park, dkk. (2016)	Independen: - Overseas subsidiary <i>Related party transactions</i> Dependen: <i>Tax avoidance</i>	- Teori: - Agensi - Metode Kuantitatif - Perusahaan non-banking yang terdaftar di Korea Exchange periode 2001-2010 - Alat Uji: SPSS	Penelitian ini menunjukkan bagaimana investasi asing langsung dan strategi transfer pricing melalui anak perusahaan asing dapat digunakan oleh perusahaan untuk menghindari pajak.
9	Dharma dan Ardiana (2016)	Independen: - Leverage - Intensitas asset tetap - Ukuran perusahaan - Koneksi politik Dependen: <i>Tax avoidance</i>	- Teori: - Agensi - Metode Kuantitatif 144 perusahaan manufaktur di BEI periode 2012-2014 - Alat analisis: regresi linier berganda - Alat Uji: SPSS	- Leverage dan intensitas asset tetap berpengaruh negative terhadap <i>tax avoidance</i> - Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> - Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap tindakan <i>tax avoidance</i>
10	Nurjanah, Isnawati, dan Sondakh (2016)	Independen: - Pajak - Mekanisme Bonus - Kepemilikan Asing - Ukuran Perusahaan	- Teori - Agensi - Akuntansi Positif - Metode Kuantitatif	- Pajak berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> - Mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i>

No.	Peneliti	Variabel	Teori, Metode, Sampel, dan Alat Uji	Hasil
		Dependen: • <i>Transfer pricing</i>	• 34 perusahaan manufaktur di BEI periode 2012-2014 • Teknik analisis: regresi logistik • Alat Uji: SPSS	- Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> - Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i>
11	Ying, Wright, dan Huang (2017)	Independen: • Struktur kepemilikan (porsi 10 pemegang saham terbesar, kepemilikan negara, kepemilikan institusional) Dependen: • Tax Aggressiveness: Book Tax Different (BTD)	• Teori - Agensi • Metode Kuantitatif • Perusahaan yang termasuk dalam Chinese A-share periode 2006-2012 • Teknik analisis: <i>ordinary least squares</i> (OLS) • Alat Uji: Eviews	- Kepemilikan negara berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan. - Porsi 10 pemegang saham terbesar berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan. - Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan.
12	Habib, Haris, dan Jiang (2017)	Independen: • Koneksi Politik: dummy variable (GCON, MCON) Intervening: • <i>Related party transactions</i> Dependen:	• Teori - Agensi • Metode Kuantitatif • 1775 firm-year observations (2007-2013) di Bursa Efek Indonesia • Teknik analisis: <i>two stage least squares</i> (2SLS) • Alat Uji: Eviews	- Perusahaan yang memiliki koneksi politik menggunakan mekanisme transaksi pihak berelasi sebagai mekanisme tunneling lebih banyak terlibat dalam manajemen laba dibandingkan dengan yang tidak memiliki koneksi politik.

No.	Peneliti	Variabel	Teori, Metode, Sampel, dan Alat Uji	Hasil
		Earnings management: Discretionary accruals (DAC)		
13	Lin, dkk. (2017)	Independen: - Tax enforcement: probability of tax audit, expertise of tax officers, outcome or consequence of tax audit Moderating: - Koneksi Politik Dependen: <i>Tax avoidance</i>: ETR	- Teori - Agensi - Metode Kuantitatif - Perusahaan yang terdaftar di Shanghai and Shenzhen stock exchanges periode 2003-2013 Sample: 11.121 firm-years - Alat Uji: Eviews	- Ikatan dewan direktur atau komisaris dengan politisi dapat menjadi tantangan signifikan bagi penegakan kepatuhan pajak yang efektif dalam ekonomi yang dikendalikan secara politis.
14	Wahab, dkk. (2017)	Independen: - Koneksi Politik Moderating: <i>Corporate governance</i> Dependen: - Tax Aggressiveness: ETR	- Teori - Agensi - Metode Kuantitatif - Perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia periode 2000-2009. Sampel: 2.538 firm-years. - Alat Uji: Eviews	- Koneksi politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. - Sedangkan <i>corporate governance</i> tidak dapat mencegah pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak.

No.	Peneliti	Variabel	Teori, Metode, Sampel, dan Alat Uji	Hasil
15	Andikaningprang, Pratomo, dan Kurnia (2017)	Independen: - Foreign investors' interests Dependen: <i>Tax avoidance</i> Control: - Profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage	- Teori - Agensi - Metode Kuantitatif 13 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2015 - Teknik analisis: regresi data panel - Alat Uji: Eviews	- Secara parsial foreign investors' interests, ukuran perusahaan, dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Secara simultan foreign investor's interests, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.
16	Idzni dan Purwanto (2017)	Independen: - Foreign ownership - Jumlah direksi dan komisaris asing - Kepemilikan institusional Dependen: <i>Tax avoidance</i>	- Teori: - Agensi - Metode Kuantitatif 182 perusahaan non finansial di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015 - Teknik analisis: regresi linear berganda - Alat Uji: SPSS	- Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. - Sedangkan direktur atau komisaris asing dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
17	Ferdiawan dan Firmansyah (2017)	Independen: - Koneksi politik - Aktivitas luar negeri - Manajemen laba riil	- Teori - Akuntansi Positif - Metode Kuantitatif	- Manajemen laba riil tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. - Koneksi politik dan aktivitas luar negeri berpengaruh positif

No.	Peneliti	Variabel	Teori, Metode, Sampel, dan Alat Uji	Hasil
		Dependen: Penghindaran pajak	65 perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2015 - Teknik analisis: regresi berganda dengan data panel - Alat Uji: SPSS	signifikan terhadap penghindaran pajak.
18	Purnomo (2016)	Independen: - Kepemilikan keluarga - Kepemilikan pemerintah - Kepemilikan asing Dependen: - Pajak agresif (ETR)	- Teori - Agensi - Legitimasi - Metode Kuantitatif - Perusahaan yang termasuk dalam LQ45 di BEI dari tahun 2010 ke 2014 - Teknik analisis: regresi data panel - Alat Uji: Eviews	- Kepemilikan keluarga berpengaruh negative signifikan terhadap tindakan pajak agresif. - Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan pajak agresif. - Kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif.
19	Refgia (2017)	Independen: - Pajak - Mekanisme bonus - Ukuran perusahaan - Kepemilikan asing - Tunneling incentive Dependen: - Transfer pricing	- Teori - Agensi - Metode Kuantitatif 13 perusahaan sektor industri dasar dan kimia di BEI periode 2011-2014 - Teknik analisis: regresi linear berganda - Alat Uji: SPSS	- Pajak berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> - Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> - Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>

No.	Peneliti	Variabel	Teori, Metode, Sampel, dan Alat Uji	Hasil
				- Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>
20	Stephanie, Sistomo, dan Simanjuntak (2017)	Independen: • Pajak • Kepemilikan asing • Ukuran perusahaan Dependen: • <i>Transfer pricing</i>	• Teori - Agensi • Metode Kuantitatif • 20 perusahaan manufaktur di BEI periode 2011-2015 • Teknik analisis: regresi linier berganda • Alat Uji: SPSS	- Pajak berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> - Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> - Ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap <i>transfer pricing</i>
21	Wicaksono (2017)	Independen: • Koneksi Politik Dependen: • Aggresivitas pajak	• Teori: - Agensi • Metode Kuantitatif • 148 perusahaan manufaktur periode 2013-2015 • Teknik analisis: regresi dengan data panel • Alat Uji: SPSS	- Koneksi politik berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
22	Park (2018)	Independen: • Related Party Transaction Moderating: • Unfair <i>Related party transactions</i> Tax Law	• Teori: - Agensi • Metode Kuantitatif • Perusahaan yang terdaftar di Korea Composite Stock Price Index periode 2001-2016	- Tingkat penghindaran pajak lebih tinggi ketika jumlah related party transaction meningkat. - Hubungan positif antara jumlah related party transaction dan penghindaran pajak melemah

No.	Peneliti	Variabel	Teori, Metode, Sampel, dan Alat Uji	Hasil
		Dependen: <i>Tax avoidance</i>: CETR, BTD residual (DDBTD).	Final sampel: 5738 firm-years by CETR, 7322 firm-years by DDBTD Alat Uji: Eviews	setelah diterapkannya Unfair <i>Related party transactions</i> Tax Law
23	Panjalusman, Nugraha, dan Setiawan (2018)	Independen: <i>Transfer pricing</i> Dependen: - Penghindaran pajak	- Teori: - Agensi - Metode Kuantitatif 15 perusahaan sektor manufaktur multinasional di BEI periode 2014-2017 - Teknik analisis: regresi data panel - Alat Uji: Eviews	- <i>Transfer pricing</i> berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak
24	Lutfia dan Pratomo (2018)	Independen: <i>Transfer pricing</i>, - Kepemilikan institusional, - Komisaris independent Dependen: <i>Tax avoidance</i>	- Teori: - Agensi - Metode Kuantitatif 41 perusahaan manufaktur di BEI periode 2012-2016 - Teknik analisis: regresi data panel - Alat Uji: Eviews	- <i>Transfer pricing</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> - Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> - Komisaris independent tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
25	Kusumasari, Fadilah, dan Sukarmanto (2018)	Independen: - Pajak - Kepemilikan asing - Ukuran perusahaan	- Teori: - Agensi - Metode Kuantitatif	- Pajak berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i>

No.	Peneliti	Variabel	Teori, Metode, Sampel, dan Alat Uji	Hasil
		Dependen: • <i>Transfer pricing</i>	• 20 perusahaan manufaktur di BEI periode 2012-2016 • Teknik analisis: regresi linier berganda • Alat Uji: SPSS	- Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> - Ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap <i>transfer pricing</i>
26	Septiyani, Ramadhanti, dan Sudibyo (2018)	Independen: • Pajak • Ukuran perusahaan • Kepemilikan asing • Mekanisme bonus • Nilai tukar Dependen: • <i>Transfer pricing</i>	• Teori: - Agensi • Metode Kuantitatif • 23 perusahaan manufaktur multinasional di BEI tahun 2015-2016 • Teknik Analisis: regresi binari • Alat Uji: SPSS	- Pajak memiliki pengaruh positif terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> - Ukuran perusahaan, kepemilikan asing, mekanisme bonus dan nilai tukar tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>

Berdasarkan *literature review* yang telah dilakukan, masih sangat terbatas penelitian yang menguji secara empiris pengaruh variabel koneksi politik terhadap *related party transactions*. Peneliti membuat suatu desain model penelitian menggunakan variabel koneksi politik dan kepentingan asing sebagai variabel independen dan penghindaran pajak sebagai variabel dependen dengan transaksi pihak berelasi sebagai variabel intervening. Model penelitian ini didapatkan dari mengkombinasikan beberapa variabel yang memiliki hasil tidak konsisten dan masih jarang dilakukan penelitian sebelumnya. Setelah itu peneliti mengikuti saran dari penelitian sebelumnya yang menyarankan untuk menggunakan transaksi pihak berelasi sebagai variabel intervening sehingga dilakukanlah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Koneksi Politik dan Kepentingan Asing terhadap Penghindaran Pajak melalui Transaksi Pihak Berelasi”**.

2.7. Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.7.1. Hubungan Koneksi Politik terhadap Transaksi Pihak Berelasi dan Penghindaran Pajak

Perusahaan dapat dikatakan memiliki koneksi politik apabila salah satu pemegang saham mayoritas atau salah satu pimpinan perusahaannya merupakan seseorang yang memiliki jabatan di pemerintahan, anggota dewan, atau petinggi partai politik lainnya (Faccio, 2006). Sedangkan transaksi dengan pihak terkait dapat berupa transfer sumber daya, penjualan, pembelian, atau kewajiban antara pihak-pihak yang saling memiliki hubungan istimewa, di antaranya ialah transaksi yang dilakukan antara perusahaan dan manajernya, perusahaan dengan pemilik utamanya, dan/atau perusahaan dengan afiliasinya (Zubaidah & Satyawati, 2015). Didukung oleh koneksi yang baik dengan pemerintah, perusahaan yang terkoneksi secara politis akan lebih mudah dalam melakukan transaksi dengan pihak berelasi mereka untuk berbagai macam tujuan.

Pada umumnya perusahaan yang memiliki koneksi politik atau koneksi dengan pemerintahan ini dapat menggunakan wewenangnya untuk melakukan aktivitas *transfer pricing* dari dan/atau ke perusahaan lainnya yang juga dimiliki oleh pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Purnomo, 2016). Tindakan tersebut tentu menguntungkan pemilik perusahaan yang terkoneksi politik. Sedangkan bagi pemegang saham lainnya atau pemegang saham minoritas akan merasa dirugikan

akibat transaksi tersebut karena perusahaan yang mereka miliki berpotensi diperiksa oleh DJP apabila transaksinya menyalahi aturan yang berlaku.

Pernyataan di atas berkaitan dengan teori Agensi II yang menyatakan bahwa terdapat dua pihak investor dalam perusahaan yaitu pemegang mayoritas dan minoritas. Pemegang saham mayoritas memiliki kecenderungan memanfaatkan posisinya untuk mencapai kepentingannya sendiri dengan mengesampingkan kepentingan dari pemegang saham minoritas (Richardson et al., 2016). Perusahaan dengan koneksi politik yang dominan di negara-negara dengan perlindungan yang lemah terhadap pemegang saham minoritas cenderung memanfaatkan posisinya untuk menggali sumber daya dari pemegang saham minoritas dengan melakukan praktik *transfer pricing* pada perusahaan yang memiliki kepentingan politik yang sama (Habib et al, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Habib et al. (2017) menunjukkan adanya pengaruh positif koneksi politik terhadap *related party transactions*. Mereka mengungkapkan bahwa perusahaan yang terkoneksi secara politis terutama koneksi dengan pemerintah akan lebih memanfaatkan transaksi dengan pihak berelasi dalam mendistribusikan sumber dayanya. Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H₁ : Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap Transaksi Pihak Berelasi

Kaitannya dengan praktik perpajakan, penelitian yang dilakukan di perusahaan Amerika berpendapat ada lima alasan perusahaan yang terkoneksi secara politis lebih agresif pajak daripada perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Pertama, perusahaan yang terkoneksi secara politis memiliki risiko deteksi yang lebih rendah oleh otoritas pajak karena mereka cenderung akan dilindungi oleh koneksi mereka dengan politisi. Kedua, kemampuan perusahaan yang terkoneksi secara politis untuk mengakses informasi mengenai perubahan dalam peraturan dan penegakan pajak di masa depan memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi perbedaan *time-series* yang lebih baik dalam undang-undang perpajakan atau penegakan pajak menggunakan strategi pajak yang kompleks. Ketiga, perusahaan yang terkoneksi secara politis memiliki tekanan pasar yang lebih kecil untuk transparan. Keempat, koneksi politik dapat mengurangi biaya politik untuk menjadi agresif pajak. Kelima, koneksi politik dapat dikaitkan dengan tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi karena efek pengambilan risiko mereka (Kim & Zhang, 2016).

Dalam konteks Indonesia, beberapa alasan yang diungkapkan tersebut juga terjadi di perusahaan milik negara dan perusahaan swasta yang terkoneksi politik. Seharusnya sebuah koneksi politik yang berada di perusahaan dapat membuat negara untuk mengontrol semua aktivitas perusahaan berjalan dengan baik (Wicaksono, 2017). Namun, kenyataannya koneksi politik justru membantu perusahaan untuk melakukan hal-hal yang merugikan negara, salah satunya melalui tindakan penghindaran pajak.

Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ferdiawan & Firmansyah (2017), Wahab et al. (2017), Ying et al. (2017) dan Kim & Zhang (2016) membuktikan bahwa koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan akan cenderung membuat perusahaan untuk semakin melakukan tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis:

H₂ : Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

2.7.2. Hubungan Kepentingan Asing terhadap Transaksi Pihak Berelasi dan Penghindaran Pajak

Kepemilikan asing ditandai dengan adanya penanaman modal oleh individu atau institusi asing, baik yang sepenuhnya dimiliki asing maupun yang berpatungan dengan pihak penanam modal dalam negeri untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia (Idzni & Purwanto, 2017). Perusahaan dengan komposisi kepemilikan yang hanya terdiri dari beberapa pihak atau terkonsentrasi cenderung akan menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dan manajemen dengan pemegang saham non pengendali. Ketika sebuah perusahaan memiliki komposisi kepemilikan asing yang besar, pemegang saham pengendali asing tersebut mempunyai pengaruh yang lebih kuat untuk menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan, salah satunya kebijakan dalam penentuan transaksi dan harga yang dilakukan dengan pihak berelasi (Barker et al., 2017).

Pernyataan tersebut menyiratkan adanya konsep *entrenchment effect* yang ditimbulkan pemegang saham pengendali pada kepemilikan asing yang cenderung

menciptakan konflik kepentingan antara pengendali pemegang saham sebagai pihak utama dengan pemegang saham minoritas sebagai agen. Pihak asing yang merupakan pemegang saham pengendali memiliki pengaruh signifikan dan saham mayoritas di suatu perusahaan dapat dengan mudah mentransfer aset atau bahkan keuntungan ke luar perusahaan menggunakan harga transfer untuk kepentingan sendiri (Meinarto, 2018). Sedangkan pemegang saham minoritas akan menerima konsekuensi apa pun atas keputusan/ kebijakan yang dilakukan oleh pihak asing sebagai pemegang saham pengendali salah satunya yaitu praktik *transfer pricing* (Refgia, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah et al. (2016) menunjukkan bahwa perusahaan yang terdiri dari kepemilikan asing yang tinggi akan lebih banyak melakukan transaksi dengan pihak berelasinya. Penelitian tersebut juga didukung oleh Sundari & Susanti (2016) yang juga mendapatkan bukti empiris bahwa kepemilikan asing memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam *transfer pricing*. Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H₃ : Kepentingan Asing berpengaruh positif terhadap Transaksi Pihak Berelasi

Investor asing yang melakukan penanaman modalnya dalam suatu negara baik secara langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*) maupun menyertakan modalnya melalui portfolio investasi (*Foreign Portfolio Investment/FPI*), memiliki tujuan untuk mendapatkan imbal hasil yang sebesar-besarnya dengan biaya seminimal mungkin

(Park et al., 2016). Demikian pula dengan aspek sosial, mereka cenderung tidak memperhatikan kondisi sosial yang ada di sekitar perusahaan mereka beroperasi (Salihu et al., 2015). *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu dari kontribusi perusahaan bagi masyarakat sekitar yang wajib mereka laksanakan. Selain CSR, perusahaan juga mempunyai kewajiban untuk membayar pajak atas usaha yang mereka lakukan di suatu negara. Kontribusi pajak dari perusahaan dapat membantu negara dalam melakukan pembangunan dan secara tidak langsung mensejahterakan masyarakat di negara tersebut (Sandy & Lukviarman, 2015).

Beberapa perusahaan dengan kepemilikan asing dan perusahaan multinasional cenderung tidak tertib dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepemilikan asing yang tinggi akan membuat perusahaan cenderung untuk melakukan penghindaran pajak untuk menekan biaya dan memaksimalkan keuntungan perusahaan. Hal itu didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Salihu et al. (2015), Andikaningprang et al. (2017), dan Park et al. (2016). Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis:

H₄ : Kepentingan Asing berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

2.7.3. Hubungan Transaksi Pihak Berelasi terhadap Penghindaran Pajak dan Peran Transaksi Pihak Berelasi sebagai Mediasi

Perusahaan dengan banyak beban pajak dapat mengurangi penghasilan kena pajak dengan melakukan bisnis dengan pihak-pihak terkait yang memiliki tingkat

beban pajak yang rendah (Park, 2018). Keputusan seperti itu akan dibuat dengan tujuan untuk meminimalkan pajak perusahaan. Pihak-pihak terkait memiliki pengaruh besar pada mitra bisnisnya, dengan demikian dimungkinkan untuk menyesuaikan jumlah transaksi sesuai keinginan antar pihak berelasi untuk berbagai kepentingan (Park et al., 2016). Pihak berelasi dari sebuah perusahaan yang dikuasai oleh investor asing memiliki kemungkinan besar berada di luar negeri yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah (Cen et al, 2017). Oleh karena itu, banyaknya transaksi mereka dengan pihak berelasi yang berada di negara surga pajak (*tax heaven country*) menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Richardson et al., 2017).

Adanya ketidaksamaan kepentingan serta informasi yang diperoleh antara pihak manajer bersama pemegang saham pengendali dengan pemegang saham non pengendali mengakibatkan terjadinya praktik *transfer pricing* yang dilakukan untuk mengecilkan beban pajak perusahaan (Lutfia & Pratomo, 2018). Pemegang saham pengendali mempunyai wewenang untuk memberikan instruksi kepada manajer agar menurunkan laba perusahaan sehingga berakibat menurunnya beban pajak dan mengesampingkan tujuan pemegang saham non pengendali yang ingin meningkatkan nilai perusahaan (Tiwa et al., 2017).

Beberapa penelitian sebelumnya mengatakan bahwa beban pajak perusahaan berkurang karena porsi transaksi dengan pihak berelasi meningkat (Ferdiawan & Firmansyah, 2017; Panjalusman et al., 2018; dan Lutfia & Pratomo, 2018). Hasil analisis dari penelitian mereka menunjukkan bahwa penghindaran pajak di perusahaan

dapat dilakukan oleh transaksi dengan pihak terkait. Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis:

H₅ : Transaksi Pihak Berelasi berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan dari uraian-uraian pengembangan hipotesis di atas, selanjutnya peneliti ingin menguji pengaruh koneksi politik dan kepentingan asing terhadap penghindaran pajak melalui transaksi pihak berelasi (*related party transaction*) yang dilakukan oleh perusahaan. Kepemilikan investor asing yang dimiliki oleh perusahaan akan dapat mendorong perusahaan untuk melakukan aktivitas transaksi dengan pihak berelasi (*related party transaction*) dengan tujuan untuk meminimalkan pajak perusahaan (Zubaidah & Satyawan, 2015).

Kegiatan tersebut juga didukung dengan adanya koneksi politik yang dapat melindungi dari risiko terdeteksi dan memiliki informasi yang lebih baik terkait peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku, serta dapat menetapkan kebijakan yang menguntungkan bagi mereka di masa mendatang (Habib et al., 2017). Oleh karena itu, peneliti melakukan pengembangan hipotesis untuk menguji pengaruh transaksi pihak berelasi sebagai mediasi pengaruh koneksi politik dan kepentingan asing dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis:

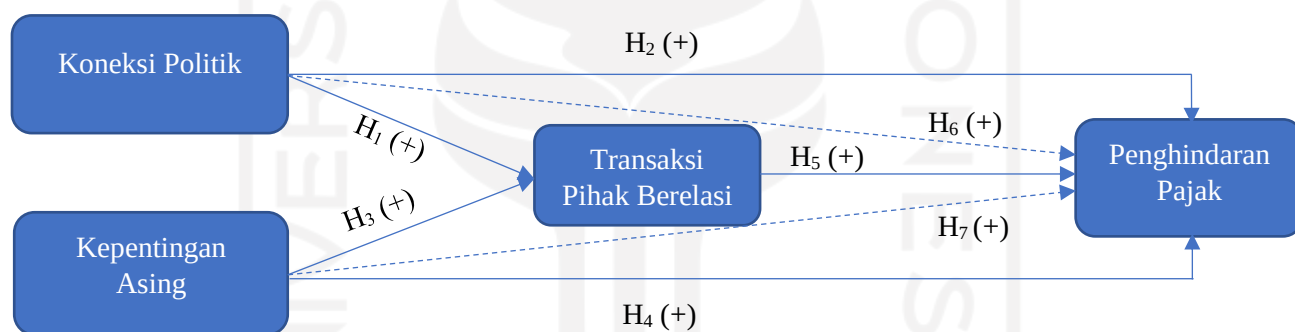
H₆ : Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak melalui Transaksi Pihak Berelasi.

H₇ : Kepentingan Asing berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak melalui Transaksi Pihak Berelasi.

2.8. Kerangka Model Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pengaruh Koneksi Politik dan Kepentingan Asing terhadap Penghindaran Pajak melalui Transaksi Pihak Berelasi. Oleh karena itu, model dalam penelitian ini diilustrasikan seperti pada Gambar 2.1:

Gambar 2.1: Kerangka Model Penelitian



Keterangan:

- > : Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen
- .-> : Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel intervening

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metodologi

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif ialah penelitian ilmiah dan sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya (Indriantoro & Supomo, 2013). Desain penelitian ini menganalisis suatu variabel independen yaitu Koneksi Politik dan Kepentingan Asing, yang mempengaruhi variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak melalui variabel *intervening* yaitu Transaksi Pihak Berelasi. Hasil dari pengujian data digunakan untuk dasar dalam menarik kesimpulan penelitian secara empiris, menerima atau menolak hipotesis yang dikembangkan dari telaah teoritis.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini ialah semua perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2018. Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dari populasi berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Adapun kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selama tahun 2013 sampai 2018.

2. Laporan tahunan menyajikan unsur data yang lengkap berhubungan dengan variabel yang diteliti. Alasannya penggunaan *purposive sampling* ini adalah untuk mendapatkan data yang sesuai dengan variabel penelitian secara lengkap dan utuh agar hasil penelitian lebih bermakna.
3. Perusahaan menggunakan tahun buku 31 Desember pada laporan keuangan tahunan. Alasan digunakannya *purposive sampling* ini adalah agar perusahaan sampel yang memiliki periode bisnis yang sama sehingga relevan untuk dibandingkan dan dilakukan pengamatan.

3.3 Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengakses situs web PT Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan situs web Perusahaan Publik untuk mengunduh Laporan Tahunan (*Annual Report*) perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. Adapun metode pengumpulan data penelitian adalah dengan menggunakan data sekunder yang melakukan observasi dan pengamatan atas informasi Laporan Tahunan perusahaan sampel.

3.4 Variabel Operasional Penelitian

Variabel dalam penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi objek penelitian untuk mendapatkan hasil riset yang bermanfaat. Penelitian ini menggunakan 3 jenis variabel yaitu variabel terikat, variabel bebas, dan variabel pemediasi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Adapun variabel yang mempengaruhi variabel penghindaran pajak adalah koneksi politik dan kepentingan

asing. Sedangkan variabel pemediasi dalam penelitian ini adalah transaksi pihak berelasi.

3.5 Variabel Penelitian

3.5.1 Penghindaran Pajak

Tax avoidance adalah perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan (wajib pajak) untuk mengefisiensikan biaya yang mengakibatkan berkurangnya pajak terutang (Sandy & Lukviarman, 2015). Ada beberapa cara dalam menghitung dan mengukur *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan, salah satunya adalah menggunakan perhitungan *effective tax rate* (ETR) (Zeng, 2018).

Effective tax rate diperoleh dari rasio beban pajak penghasilan (baik pajak kini maupun pajak total) terhadap pendapatan sebelum pajak perusahaan. Menurut Zeng (2018), ETR mencerminkan kegiatan perencanaan pajak dan penghindaran pajak secara langsung mempengaruhi laba bersih perusahaan dan biasanya digunakan oleh para pemangku kepentingan dan manajer untuk memperkirakan beban pajak keseluruhan perusahaan. Wahab, dkk. (2017) dan Wijayanti, dkk. (2016) dalam penelitiannya menggunakan ETR sebagai pengukuran *tax avoidance* karena mencerminkan beban pajak aktual suatu perusahaan. Selain itu karena penghasilan kena pajak perusahaan tidak selalu sesuai dengan pendapatan akuntansi yang dilaporkan perusahaan, ETR adalah pengukuran terbaik untuk mengidentifikasi kesenjangan antara akuntansi keuangan dan pendapatan kena pajak. Penelitian ini

mengikuti pengukuran yang dilakukan oleh Zeng (2018), Wahab,dkk. (2017) dan Wijayanti, dkk (2016) dengan menggunakan ETR sebagai alat ukur *tax avoidance*.

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Pendapatan sebelum pajak}}$$

Penghindaran pajak perusahaan berhubungan negatif dengan perhitungan ETR. Oleh karena itu, untuk memudahkan pemahaman intuitif pada penelitian ini, hasil dari perhitungan ETR akan dikalikan dengan (-1) untuk mengubah korelasi menjadi nilai positif.

3.5.2 Transaksi Pihak Berelasi

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang sesuai bagi grupnya (Zheng, 2017). *Transfer pricing* dapat menjadi sesuatu yang negatif karena penentuan harga transaksi hubungan istimewa tersebut dapat dimanipulasi untuk mengurangi laba dari salah satu anggota grup perusahaan dan kemudian melaporkan perusahaan tersebut seolah-olah rugi agar terhindar dari kewajiban perpajakan di negara tersebut (Gunadi, 2012). Penelitian ini mengacu pada penelitian Kusumasari et al., (2017) yang mengukur variabel transaksi pihak berelasi dengan membagi piutang dagang pihak berelasi dibagi dengan total piutang perusahaan.

$$\text{Transaksi Pihak Berelasi} = \frac{\text{Piutang dagang pihak berelasi}}{\text{Total piutang}}$$

3.5.3 Koneksi Politik

Sebuah perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik jika paling kurang satu pemegang saham utama (orang yang memiliki setidaknya 10 persen hak suara berdasarkan jumlah saham yang dimiliki) atau satu dari pimpinan (CEO, presiden direktur, wakil presiden direktur, kepala bagian atau sekretaris) merupakan anggota parlemen, menteri, atau memiliki hubungan dekat dengan tokoh atau partai politik (Faccio, 2006). Pada penelitian Habib et al. (2017), koneksi politik yang ada di perusahaan diukur dengan melihat porsi kepemilikan yang dimiliki oleh pemerintah dan adanya komisaris yang juga menjadi anggota partai politik atau memiliki relasi dengan pemerintahan dan pengurus partai politik. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan 3 (tiga) konstruk penilaian untuk menggambarkan variabel koneksi politik, yaitu:

1. Persentase saham yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

$$\text{Kepemilikan Pemerintah} = \frac{\text{Saham yang dimiliki pemerintah}}{\text{Total saham beredar}}$$

2. Variabel dummy yang bernilai 1 untuk perusahaan yang memiliki anggota dewan komisaris yang berelasi dengan pemerintahan atau berasal dari politisi, sedangkan bernilai 0 untuk yang tidak.

3. Variabel dummy yang bernilai 1 untuk perusahaan yang memiliki anggota direksi yang berelasi dengan pemerintahan atau berasal dari politisi, sedangkan bernilai 0 untuk yang tidak.

3.5.4 Kepentingan Asing

Kepentingan Asing terhadap suatu perusahaan dapat dilihat dari komposisi kepemilikannya yang terdiri atas kepemilikan asing dari perorangan ataupun instansi (Salihu et al., 2015). Kepemilikan saham oleh pihak asing adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak-pihak dari luar negeri baik individu maupun institusional. Menurut Septiyani et al. (2018) dan Refgia (2017), kepemilikan asing adalah proporsi dari saham beredar yang dimiliki oleh investor atau investor asing yang dimiliki perusahaan oleh perorangan, badan hukum, pemerintah dan statusnya bagian luar negeri terhadap jumlah total saham beredar. Pada penelitian ini akan menggunakan 3 (tiga) konstruk penilaian untuk menggambarkan variabel kepentingan asing, yaitu:

1. Persentase saham yang dimiliki oleh pihak asing.

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Saham yang dimiliki pihak asing}}{\text{Total saham beredar}}$$

2. Variabel dummy yang bernilai 1 untuk perusahaan yang memiliki anggota dewan komisaris warga negara asing, sedangkan bernilai 0 untuk yang tidak.
3. Variabel dummy yang bernilai 1 untuk perusahaan yang memiliki anggota direksi warga negara, sedangkan bernilai 0 untuk yang tidak.

3.6 Teknik Pengujian dan Hipotesis

3.6.1 Analisa Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum dan minimum pada variabel-variabel dalam penelitian (Ghozali, 2018). Mean adalah nilai rata-rata dari data yang terkumpul. Maximum adalah nilai tertinggi dari data yang terkumpul. Minimum adalah nilai terendah dari data yang terkumpul. Standar deviasi adalah nilai yang digunakan untuk mengukur seberapa besar data di dalam penelitian tersebar.

3.6.2 Analisis *Structural Equation Modeling* (SEM)

Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah dengan persamaan permodelan *structural equation modeling* (SEM). Permodelan SEM merupakan pengembangan lebih lanjut dari *path analysis*, pada metode SEM hubungan kausalitas antar variabel eksogen dan variabel endogen dapat ditentukan secara lebih lengkap (Latan & Ghozali, 2012). Dengan menggunakan SEM tidak hanya hubungan kausalitas (langsung dan tidak langsung) pada variabel atau konstruk yang diamati bisa terdeteksi, tetapi juga komponen-komponen yang berkontribusi terhadap pembentukan konstruksi itu dapat ditentukan besarnya. Dengan demikian, hubungan kausalitas diantara variabel atau konstruk menjadi lebih informatif, lengkap, dan akurat.

3.6.3 *Partial Least Square (PLS)*

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif *Partial Least Square* (PLS). PLS merupakan metode analisis yang *powerfull* karena tidak didasarkan atas banyak asumsi (Abdullah, 2015). Keunggulan dari metode PLS ini adalah data tidak harus berdistribusi normal multivariat, ukuran sampel tidak harus besar, dan PLS tidak saja bisa digunakan untuk mengkonfirmasi teori, tetapi dapat juga digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten. Penelitian ini menggunakan *software SmartPLS* untuk melakukan pengujian hipotesisnya.

3.6.4 *Analisa Model Struktural (Inner Model)*

Inner model, yaitu spesifikasi hubungan antar variabel laten (*structural model*), disebut juga dengan *inner relation*, menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan teori substantif penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen, *Stone-Geisser Q-square* test untuk *predictive relevance* dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural.

a. *R-Square* (R^2)

Dalam menilai struktural dimulai dengan melihat nilai *R-squares* untuk setiap nilai variabel endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Perubahan nilai *R-squares* (R^2) dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen apakah memiliki pengaruh yang substantif. Nilai *R-squares* 0.75, 0.50 dan 0,25 dapat disimpulkan bahwa model kuat, moderat dan lemah (Latan & Ghazali, 2012).

Hasil dari PLS *R-squares* merepresentasikan jumlah *variance* dari konstruk yang dijelaskan oleh model. Semakin tinggi nilai R^2 berarti semakin baik model prediksi dan model penelitian yang diajukan (Latan & Ghazali, 2012).

b. Q^2 Predictive Relevance

Disamping melihat besarnya *R-square*, evaluasi model PLS dapat juga dilakukan dengan Q^2 *predictive relevance* atau *predictive sample reuse* untuk merepresentasi sintesis dari *cross-validation* dan fungsi *fitting* dengan prediksi dari *observed* variabel dan estimasi dari parameter konstruk. Nilai $Q^2 > 0$ menunjukkan bahwa model mempunyai *predictive relevance*, sedangkan nilai $Q^2 < 0$ menunjukkan bahwa model kurang memiliki *predictive relevance* (Latan & Ghazali, 2012). Q^2 mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya.

c. Uji Signifikansi

Dalam menilai signifikansi pengaruh antar variabel, perlu dilakukan prosedur *bootstrapping*. Prosedur *bootstrap* menggunakan seluruh sampel asli untuk melakukan *resampling* kembali. Disarankan untuk menggunakan *number of bootstrap samples* sebesar 5.000 dengan catatan jumlah tersebut harus lebih besar dari original sampel. Namun beberapa literatur menyarankan *number of bootstrap samples* sebesar 200-1000 sudah cukup untuk mengoreksi standar *error estimate* PLS (Latan & Ghazali, 2012). Dalam metode *resampling bootstrap*, nilai signifikansi yang digunakan (*two-tailed*) t-value 1,65

(*significance level* = 10%), 1,96 (*significance level* = 5%) dan 2,58 (*significance level* = 1%). Pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 10% dengan t-value 1,65.

3.6.5 *Model Fit*

Penelitian ini menggunakan *Standardized Root Mean Square Residual* (SRMR) untuk mengukur *model fit* dari model penelitian. Henseler dkk. (2014) memperkenalkan SRMR sebagai ukuran *goodness of fit* untuk PLS-SEM yang dapat digunakan untuk menghindari kesalahan spesifikasi model.

SRMR didefinisikan sebagai perbedaan antara korelasi yang diamati dan matriks korelasi tersirat model. Dengan demikian, memungkinkan untuk menilai besarnya rata-rata perbedaan antara korelasi yang diamati dan korelasi yang diharapkan sebagai pengukuran *model fit*. Nilai SRMR kurang dari 0,10 atau 0,08 (dalam versi yang lebih konservatif; lihat Hu dan Bentler, 1999) dianggap memiliki *model fit* yang baik.

3.6.6 *Analisa Efek Mediasi*

Pengujian efek mediasi dalam analisis menggunakan PLS menggunakan prosedur dengan tahapan sebagai berikut (Latan & Ghazali, 2012):

1. Model pertama, menguji pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen dan harus signifikan pada t-statistik $> 1,65$
2. Model kedua, menguji pengaruh variabel eksogen terhadap variabel mediasi dan harus signifikan pada t-statistik $> 1,65$

3. Model ketiga, menguji secara simultan pengaruh variabel eksogen dan mediasi terhadap variabel endogen.

Pada pengujian tahap akhir, jika pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen tidak signifikan sedangkan pengaruh variabel mediasi terhadap variabel endogen signifikan pada t -statistik $> 1,65$, maka variabel mediasi terbukti memediasi pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen.

3.6.7 Pengujian Hipotesis

3.6.7.1 Analisis Regresi

Pada penelitian ini terdapat variabel yang berfungsi sebagai intervening. Oleh karena itu metode regresi berganda tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga regresi yang digunakan adalah model *path analysis*. Menurut Robert dalam Jonathan (2007) *path analysis* merupakan suatu teknik untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi pada regresi berganda jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung. Sementara itu Webley dalam Jonathan (2007) mendefinisikan *path analysis* sebagai pengembangan langsung untuk regresi berganda dengan tujuan untuk memberikan estimasi tingkat kepentingan dan signifikansi hubungan sebab akibat hipotetikal dalam seperangkat variabel.

Berdasarkan model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model analisis regresi jalur, yang menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Transaksi Pihak Berelasi (TPB)} = \beta_1(KP) + \beta_3(KA) + e$$

$$\text{Penghindaran Pajak (PP)} = \beta_2(KP) + \beta_4(KA) + \beta_5(TPB) + e$$

$$\text{Penghindaran Pajak (PP)} = \beta_6(KP).(TPB) + e$$

$$\text{Penghindaran Pajak (PP)} = \beta_7(KA).(TPB) + e$$

Keterangan:

TPB	= Transaksi Pihak Berelasi
PP	= Penghindaran Pajak
β_{1-7}	= Koefisien Jalur
KP	= Koneksi Politik
KA	= Kepentingan Asing
e	= Error

3.6.7.2 Hipotesa Operasional

Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap Transaksi Pihak Berelasi

$H_{01}; \beta_1 \leq 0$: Koneksi Politik tidak berpengaruh positif terhadap Transaksi Pihak Berelasi.

$H_{A1}; \beta_1 > 0$: Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap Transaksi Pihak Berelasi.

Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

$H_{02}; \beta_2 \leq 0$: Koneksi Politik tidak berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

$H_{A2};\beta_2>0$: Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

Kepentingan Asing berpengaruh positif terhadap Transaksi Pihak Berelasi

$H_{03};\beta_3\leq 0$: Kepentingan Asing tidak berpengaruh positif terhadap Transaksi Pihak Berelasi.

$H_{A3};\beta_3>0$: Kepentingan Asing berpengaruh positif terhadap Transaksi Pihak Berelasi.

Kepentingan Asing berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

$H_{04};\beta_4\leq 0$: Kepentingan Asing tidak berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

$H_{A4};\beta_4>0$: Kepentingan Asing berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

Transaksi Pihak Berelasi berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

$H_{05};\beta_5\leq 0$: Transaksi Pihak Berelasi tidak berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

$H_{A5};\beta_5>0$: Transaksi Pihak Berelasi berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak.

Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak melalui Transaksi Pihak Berelasi.

$H_{06};\beta_6\leq 0$: Koneksi Politik tidak berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak melalui Transaksi Pihak Berelasi.

$H_{A6};\beta_6>0$: Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak melalui Transaksi Pihak Berelasi.

Kepentingan Asing berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak melalui Transaksi Pihak Berelasi.

$H_{07}; \beta_7 \leq 0$: Kepentingan Asing tidak berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak melalui Transaksi Pihak Berelasi.

$H_{A7}; \beta_7 > 0$: Kepentingan Asing berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak melalui Transaksi Pihak Berelasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai 2018. Berdasarkan metode purposive sampling, maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 126 perusahaan yang memenuhi kriteria. Adapun prosedur pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1: Prosedur Pemilihan Sampel

No	Uraian	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selama tahun 2013 sampai 2018	132
2	Laporan tahunan tidak menyajikan unsur data yang lengkap berhubungan dengan variabel yang diteliti	(4)
3	Perusahaan tidak menggunakan tahun buku 31 Desember pada laporan keuangan tahunan	(2)
	Jumlah	126

4.2 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini guna memberikan gambaran data secara deskriptif. Statistik deskripsi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.2: Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Median	Min	Max	Standard Deviation
Kepemilikan Pemerintah	755	0,032	0	0	0,900	0,151
Kepemilikan Asing	755	0,310	0,200	0	0,990	0,329
Transaksi Pihak Berelasi	755	0,200	0,046	0	0,998	0,284
Penghindaran Pajak	755	-0,237	-0,250	-8,816	7,677	0,771

Tabel 4.3: Statistik Deskriptif Variabel Dummy

Variabel	Frekuensi	Persen
Komisaris politisi		
- Tidak memiliki komisaris politisi	517	68,48
- Memiliki komisaris politisi	238	31,52
Direktur politisi		
- Tidak memiliki direktur politisi	713	94,44
- Memiliki direktur politisi	42	5,56
Komisaris asing		
- Tidak memiliki komisaris asing	527	69,80
- Memiliki komisaris asing	228	30,20
Direktur asing		
- Tidak memiliki direktur asing	480	63,58
- Memiliki direktur asing	275	36,42

Berdasarkan Tabel 4.2 dan Tabel 4.3, dapat disimpulkan deskripsi masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Variabel kepemilikan pemerintah memiliki nilai minimum sebesar 0, artinya dalam data penelitian ini terdapat perusahaan manufaktur yang sahamnya tidak dimiliki oleh pemerintah. Sementara nilai maksimum dari kepemilikan pemerintah pada penelitian ini ialah sebesar 0,900, yang berarti bahwa terdapat perusahaan manufaktur yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah sebesar 90%. Secara keseluruhan, variabel kepemilikan pemerintah pada penelitian ini memiliki nilai rata-rata sebesar 0,032. Standar deviasi dari variabel kepemilikan pemerintah ialah sebesar 0,151 yang berarti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel kepemilikan pemerintah adalah 0,151 dari 755 sampel yang digunakan.
2. Variabel dummy komisaris politisi menunjukkan bahwa terdapat perusahaan manufaktur yang mempunyai komisaris yang berasal dari pemerintahan atau berafiliasi dengan pemerintah atau partai politik sebanyak 238 perusahaan atau sebanyak 31,52% dari total sampel, sedangkan sebanyak 517 perusahaan atau sebanyak 68,48% dari total sampel yang tidak mempunyai komisaris politisi.
3. Variabel dummy direksi politisi menunjukkan bahwa terdapat perusahaan manufaktur yang mempunyai direksi yang berasal dari pemerintahan atau berafiliasi dengan pemerintah atau partai politik sebanyak 42 perusahaan atau sebanyak 5,56% dari total sampel, sedangkan sebanyak 713 perusahaan atau sebanyak 94,44% dari total sampel yang tidak mempunyai direksi politisi.

4. Variabel kepemilikan asing memiliki nilai minimum sebesar 0, artinya dalam data penelitian ini terdapat perusahaan manufaktur yang sahamnya tidak dimiliki oleh pihak asing. Sementara nilai maksimum dari kepemilikan pemerintah pada penelitian ini ialah sebesar 0,990, yang berarti bahwa terdapat perusahaan manufaktur yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing sebesar 99%. Secara keseluruhan, variabel kepemilikan asing pada penelitian ini memiliki nilai rata-rata sebesar 0,310. Standar deviasi dari variabel kepemilikan asing ialah sebesar 0,329 yang berarti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel kepemilikan asing adalah 0,329 dari 755 sampel yang digunakan.
5. Variabel dummy komisaris asing menunjukkan bahwa terdapat perusahaan manufaktur yang mempunyai komisaris yang berasal dari warga negara asing sebanyak 228 perusahaan atau sebanyak 30,20% dari total sampel, sedangkan sebanyak 527 perusahaan atau sebanyak 69,80% dari total sampel yang tidak mempunyai komisaris asing.
6. Variabel dummy direksi asing menunjukkan bahwa terdapat perusahaan manufaktur yang mempunyai direksi yang berasal dari warga negara asing sebanyak 275 perusahaan atau sebanyak 36,42% dari total sampel, sedangkan sebanyak 480 perusahaan atau sebanyak 63,58% dari total sampel yang tidak mempunyai direksi asing.
7. Variabel transaksi pihak berelasi memiliki nilai minimum sebesar 0, yang berarti bahwa terdapat perusahaan manufaktur dalam sampel penelitian ini yang

tidak memiliki transaksi dengan pihak berelasi. Sedangkan nilai maksimum dari variabel transaksi pihak berelasi dalam penelitian ini sebesar 0,998 yang berarti bahwa terdapat perusahaan manufaktur yang memiliki transaksi pihak berelasi sebesar 99,8% dari total transaksinya. Secara keseluruhan, variabel transaksi pihak berelasi pada penelitian ini memiliki nilai rata-rata sebesar 0,200. Standar deviasi dari variabel transaksi pihak berelasi ialah sebesar 0,284 yang berarti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel kepemilikan asing adalah 0,284 dari 755 sampel yang digunakan.

8. Variabel penghindaran pajak memiliki nilai minimum sebesar -8,816, yang berarti bahwa terdapat perusahaan manufaktur dalam sampel penelitian ini yang memiliki perbandingan antara beban pajak dan pendapatan sebelum pajak sebesar -8,816, sedangkan nilai maksimum dari variabel penghindaran pajak pada penelitian ini ialah sebesar 7,677. Secara keseluruhan, variabel penghindaran pajak pada penelitian ini memiliki nilai rata-rata sebesar -0,237. Standar deviasi dari variabel penghindaran pajak ialah sebesar 0,771 yang berarti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel penghindaran pajak adalah 0,771 dari 755 sampel yang digunakan.

4.3 Analisis Model Struktural

Sebelum melakukan uji hipotesis, peneliti melakukan evaluasi terhadap model struktural dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen dan *Stone-Geisser Q-square* test untuk *predictive relevance*. Tabel 4.4 meilustrasikan hasil uji R-Square.

Tabel 4.4: Analisis R-Square

	R Square
Transaksi Pihak Berelasi	0,046
Penghindaran Pajak	0,016

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat diketahui sebagai berikut:

1. Nilai R-square Transaksi Pihak Berelasi sebesar 0,046. Hal ini berarti bahwa variabilitas Transaksi Pihak Berelasi dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel eksogen penelitian ini sebesar 4,6%, sedangkan 95,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang diteliti.
2. Nilai R-square Penghindaran Pajak sebesar 0,016. Hal ini berarti bahwa variabilitas Penghindaran Pajak dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel eksogen penelitian ini sebesar 1,6%, sedangkan 98,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang diteliti.

Sedangkan hasil uji *Q-Square* disajikan seperti pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5: Analisis Q-Square

	Q²
Transaksi Pihak Berelasi	0,040
Penghindaran Pajak	0,002

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui sebagai berikut:

1. Nilai Q-square Transaksi Pihak Berelasi sebesar 0,040 atau Q-square > 0, hal ini berarti bahwa model memiliki *predictive relevance*.
2. Nilai Q-square Penghindaran Pajak sebesar 0,002 atau Q-square > 0, hal ini berarti bahwa model memiliki *predictive relevance*.

4.4 Model Fit

Berdasarkan analisis data menggunakan *software* SmartPLS 3, dihasilkan nilai SRMR sebesar 0,092. Nilai SRMR kurang dari 0,10 menandakan bahwa model penelitian ini dapat dikategorikan memiliki *model fit* yang baik.

4.5 Pengujian Hipotesis

Suatu hipotesis dapat diidentifikasi bahwa diterima atau ditolak dengan memperhatikan nilai signifikansi antar konstruk, t-statistik, p-values. Oleh karena itu, estimasi pengukuran dan standar error tidak dihitung dengan asumsi statistik, melainkan didasarkan pada observasi empiris. Melalui metode bootstrapping, hipotesis penelitian ini diterima jika nilai signifikansi p-values < 0,05, begitu pula sebaliknya.

Tabel 4.6: Nilai Koefisien Jalur pada Pengujian Model Struktural

	Original Sample (O)	T Statistics	P Values	Hipotesis
Koneksi Politik -> Transaksi Pihak Berelasi	0,187	3,841	0,000**	Diterima
Koneksi Politik -> Penghindaran Pajak	0,088	1,708	0,088*	Diterima

	Original Sample (O)	T Statistics	P Values	Hipotesis
Kepentingan Asing -> Transaksi Pihak Berelasi	0,107	2,770	0,006**	Diterima
Kepentingan Asing -> Penghindaran Pajak	0,023	1,649	0,091*	Diterima
Transaksi Pihak Berelasi -> Penghindaran Pajak	0,073	2,144	0,032**	Diterima

*signifikansi statistik pada level 10%

**signifikansi statistik pada level 5%

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa konstruk eksogen Koneksi Politik mempunyai pengaruh positif ($O = 0,187$) terhadap konstruk Transaksi Pihak Berelasi dengan nilai t-statistics sebesar 3,841 dan p-value sebesar 0,000. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap Transaksi Pihak Berelasi diterima.

Konstruk eksogen Koneksi Politik mempunyai pengaruh positif ($O = 0,088$) terhadap konstruk Penghindaran Pajak dengan nilai t-statistics sebesar 1,708 dan p-value sebesar 0,088. Oleh karena itu, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak diterima.

Konstruk eksogen Kepentingan Asing mempunyai pengaruh positif ($O = 0,107$) terhadap konstruk Transaksi Pihak Berelasi dengan nilai t-statistics sebesar 2,770 dan p-value sebesar 0,006. Oleh karena itu, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Kepentingan Asing berpengaruh positif terhadap Transaksi Pihak Berelasi diterima.

Konstruk eksogen Kepentingan Asing mempunyai pengaruh positif ($O = 0,023$) terhadap konstruk Penghindaran Pajak dengan nilai t-statistics sebesar 1,649 dan p-value sebesar 0,091. Oleh karena itu, hipotesis keempat yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh Kepentingan Asing terhadap Penghindaran Pajak diterima.

Konstruk eksogen Transaksi Pihak Berelasi mempunyai pengaruh positif ($O = 0,073$) terhadap konstruk Penghindaran Pajak dengan nilai t-statistics sebesar 2,144 dan p-value sebesar 0,032. Oleh karena itu, hipotesis kelima yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh Transaksi Pihak Berelasi terhadap Penghindaran Pajak diterima.

Tabel 4.7: Nilai Koefisien Jalur Uji Efek Variabel Intervening

	Original Sample (O)	T Statistics	P Values	Hipotesis
Koneksi Politik -> Transaksi Pihak Berelasi -> Penghindaran Pajak	0,014	1,969	0,049**	Diterima
Kepentingan Asing -> Transaksi Pihak Berelasi -> Penghindaran Pajak	0,008	1,975	0,043**	Diterima

*signifikansi statistik pada level 10%

**signifikansi statistik pada level 5%

Nilai dari *specific indirect effects* pada hasil bootstrapping SmartPLS dapat digunakan untuk melihat efek mediasi yang dilakukan oleh variabel intervening pada pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Nilai tersebut digunakan untuk melihat hasil pengujian hipotesis keenam dan ketujuh pada penelitian ini.

Berdasarkan Tabel 4.6 dan Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa variabel Transaksi Pihak Berelasi mampu memediasi secara penuh (*full mediation*) pengaruh Koneksi Politik dan Transaksi Pihak Berelasi terhadap Penghindaran Pajak.

4.6 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis

4.6.1 Hubungan Koneksi Politik terhadap Transaksi Pihak Berelasi dan Penghindaran Pajak

Pada umumnya perusahaan yang memiliki koneksi politik atau koneksi dengan pemerintahan ini dapat menggunakan wewenanganya untuk melakukan aktivitas *transfer pricing* dari dan/atau ke perusahaan lainnya yang juga dimiliki oleh pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Purnomo, 2016). Tindakan tersebut tentu menguntungkan pemilik perusahaan yang terkoneksi politik.

Berdasarkan hasil analisis data, dapat diketahui bahwa koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap transaksi pihak berelasi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa koneksi politik yang dimiliki oleh suatu perusahaan manufaktur dapat meningkatkan transaksi pihak berelasi. **Oleh karena itu, hipotesis pertama pada penelitian ini diterima.**

Berdasarkan teori Agensi II yang menyatakan bahwa terdapat dua pihak investor dalam perusahaan yaitu pemegang mayoritas dan minoritas. Pemegang saham mayoritas memiliki kecenderungan memanfaatkan posisinya untuk mencapai kepentingannya sendiri dengan mengesampingkan kepentingan dari pemegang saham

minoritas (Richardson et al., 2016). Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Habib et al. (2017) menunjukkan adanya pengaruh positif koneksi politik terhadap *related party transactions*.

Kaitannya dengan penghindaran pajak, Seharusnya sebuah koneksi politik yang berada di perusahaan dapat membuat negara untuk mengontrol semua aktivitas perusahaan berjalan dengan baik (Wicaksono, 2017). Namun, kenyataannya koneksi politik justru membantu perusahaan untuk melakukan hal-hal yang merugikan negara, salah satunya melalui tindakan penghindaran pajak. Hal tersebut didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya yaitu Ferdiawan & Firmansyah (2017), Wahab et al. (2017), Ying et al. (2017) dan Kim & Zhang (2016) membuktikan bahwa koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan akan cenderung membuat perusahaan untuk semakin melakukan tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil analisis data, dapat diketahui bahwa koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini dapat membuktikan bahwa koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan secara langsung dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. **Oleh karena itu, hipotesis kedua pada penelitian ini diterima.**

4.6.2 Hubungan Kepentingan Asing terhadap Transaksi Pihak Berelasi dan Penghindaran Pajak

Kepentingan asing dalam penelitian ini digambarkan dari adanya kepemilikan asing pada saham perusahaan tersebut dan terdapatnya warga negara asing dalam susunan dewan komisaris dan direksi suatu perusahaan. Ketika sebuah perusahaan memiliki komposisi kepemilikan asing yang besar, pemegang saham pengendali asing tersebut mempunyai pengaruh yang lebih kuat untuk menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan, salah satunya kebijakan dalam penentuan transaksi dan harga yang dilakukan dengan pihak berelasi (Barker et al., 2017).

Perusahaan dengan komposisi kepemilikan yang hanya terdiri dari beberapa pihak atau terkonsentrasi cenderung akan menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dan manajemen dengan pemegang saham non pengendali. Pihak asing yang merupakan pemegang saham pengendali memiliki pengaruh signifikan dan saham mayoritas di suatu perusahaan dapat dengan mudah mentransfer aset atau bahkan keuntungan ke luar perusahaan menggunakan harga transfer untuk kepentingan sendiri (Meinarto, 2018).

Berdasarkan hasil analisis data, dapat diketahui bahwa kepentingan asing berpengaruh positif signifikan terhadap transaksi pihak berelasi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepentingan asing yang terdapat pada suatu perusahaan manufaktur dapat meningkatkan transaksi pihak berelasi perusahaan. **Oleh karena itu, hipotesis ketiga pada penelitian ini diterima.**

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurjanah et al. (2016) dan Sundari & Susanti (2016) yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepentingan asing akan lebih banyak melakukan transaksi dengan pihak berelasinya.

Kaitannya dengan penghindaran pajak, Investor asing yang melakukan penanaman modalnya dalam suatu negara baik secara langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*) maupun menyertakan modalnya melalui portfolio investasi (*Foreign Portfolio Investment/FPI*), memiliki tujuan untuk mendapatkan imbal hasil yang sebesar-besarnya dengan biaya seminimal mungkin (Park et al., 2016).

Pihak asing cenderung tidak memperhatikan kondisi sosial yang ada di sekitar perusahaan mereka beroperasi (Salihu et al., 2015). *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu dari kontribusi perusahaan bagi masyarakat sekitar yang wajib mereka laksanakan. Selain CSR, perusahaan juga mempunyai kewajiban untuk membayar pajak atas usaha yang mereka lakukan di suatu negara. Kontribusi pajak dari perusahaan dapat membantu negara dalam melakukan pembangunan dan secara tidak langsung mensejahterakan masyarakat di negara tersebut (Sandy & Lukviarman, 2015).

Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Salihu et al. (2015), Andikaningprang et al. (2017), dan Park et al. (2016) membuktikan bahwa kepentingan pihak asing yang terdapat pada suatu perusahaan dapat membuat perusahaan cenderung

untuk melakukan penghindaran pajak untuk menekan biaya dan memaksimalkan keuntungan perusahaan.

Berdasarkan hasil analisis data, dapat diketahui bahwa kepentingan asing berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepentingan asing yang dimiliki oleh suatu perusahaan secara langsung berpengaruh dalam praktik atau kegiatan penghindaran pajak. Oleh karena itu, **hipotesis keempat pada penelitian ini diterima.**

4.6.3 Hubungan Transaksi Pihak Berelasi terhadap Penghindaran Pajak dan Peran Transaksi Pihak Berelasi sebagai Mediasi

Pihak berelasi dari sebuah perusahaan yang dikuasai oleh investor asing memiliki kemungkinan besar berada di luar negeri yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah (Cen et al, 2017). Oleh karena itu, banyaknya transaksi mereka dengan pihak berelasi yang berada di negara surga pajak menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Richardson et al., 2017).

Penelitian yang dilakukan di perusahaan Amerika berpendapat ada lima alasan perusahaan yang terkoneksi secara politis lebih agresif pajak daripada perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik. Pertama, perusahaan yang terkoneksi secara politis memiliki risiko deteksi yang lebih rendah oleh otoritas pajak karena mereka cenderung akan dilindungi oleh koneksi mereka dengan politisi. Kedua, kemampuan perusahaan yang terkoneksi secara politis untuk mengakses informasi mengenai perubahan dalam peraturan dan penegakan pajak di masa depan memungkinkan mereka untuk

mengeksplorasi perbedaan *time-series* yang lebih baik dalam undang-undang perpajakan atau penegakan pajak menggunakan strategi pajak yang kompleks. Ketiga, perusahaan yang terkoneksi secara politis memiliki tekanan pasar yang lebih kecil untuk transparan. Keempat, koneksi politik dapat mengurangi biaya politik untuk menjadi agresif pajak. Kelima, koneksi politik dapat dikaitkan dengan tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi karena efek pengambilan risiko mereka (Kim & Zhang, 2016).

Adanya ketidaksamaan kepentingan serta informasi yang diperoleh antara pihak manajer bersama pemegang saham pengendali dengan pemegang saham non pengendali mengakibatkan terjadinya praktik *transfer pricing* yang dilakukan untuk mengecilkan beban pajak perusahaan (Lutfia & Pratomo, 2018).

Berdasarkan hasil analisis data, dapat diketahui bahwa transaksi pihak berelasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi yang dimiliki oleh suatu perusahaan berpengaruh dalam praktik atau kegiatan penghindaran pajak. Oleh karena itu, **hipotesis kelima pada penelitian ini diterima.**

Hasil penelitian ini juga didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya yaitu Ferdiawan & Firmansyah (2017), Panjalusman et al. (2018), dan Lutfia & Pratomo (2018) menunjukkan bahwa penghindaran pajak di perusahaan dapat dilakukan oleh transaksi dengan pihak terkait.

Selanjutnya pada pengujian pengaruh koneksi politik dan kepentingan asing terhadap penghindaran pajak melalui transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan hasil analisis data, dapat diketahui bahwa transaksi pihak berelasi secara signifikan mampu memediasi pengaruh koneksi politik dan kepentingan asing terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi yang dilakukan dapat mempengaruhi praktik atau kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan koneksi politik dan kepentingan asing. Oleh karena itu, **hipotesis keenam dan ketujuh pada penelitian ini diterima.**

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai pengaruh koneksi politik dan kepentingan asing terhadap penghindaran pajak melalui transaksi pihak berelasi, berikut merupakan kesimpulan yang dapat diambil antara lain:

1. Koneksi politik berpengaruh positif terhadap transaksi pihak berelasi, yang artinya semakin besar koneksi politik yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat meningkatkan transaksi pihak berelasi perusahaan tersebut.
2. Koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, yang artinya semakin besar koneksi politik yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat meningkatkan praktik penghindaran pajak pada perusahaan tersebut.
3. Kepentingan asing berpengaruh positif terhadap transaksi pihak berelasi, yang artinya semakin besar kepentingan asing yang terdapat pada suatu perusahaan dapat meningkatkan transaksi pihak berelasi perusahaan tersebut.
4. Kepentingan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, yang artinya semakin besar kepentingan politik yang terdapat pada suatu perusahaan dapat meningkatkan praktik penghindaran pajak pada perusahaan tersebut.

5. Transaksi pihak berelasi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, yang artinya semakin besar transaksi pihak berelasi yang terdapat pada suatu perusahaan dapat meningkatkan praktik penghindaran pajak pada perusahaan tersebut.
6. Koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak melalui transaksi pihak berelasi, yang artinya transaksi pihak berelasi dapat memediasi hubungan koneksi politik pada praktik penghindaran pajak.
7. Kepentingan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak melalui transaksi pihak berelasi, yang artinya transaksi pihak berelasi dapat memediasi hubungan kepentingan asing pada praktik penghindaran pajak.

5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan bagi pihak terkait, antara lain:

1. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dalam praktik penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia. Selain perusahaan dengan kepentingan asing, perusahaan dengan koneksi politik, termasuk BUMN dan BUMD yang dibuktikan secara empiris dalam penelitian ini bahwa adanya praktik penghindaran pajak melalui praktik transaksi pihak berelasi. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN dan pemerintah daerah yang

bertindak selaku pemegang saham perusahaan BUMN dan BUMD dapat mempertimbangkan untuk menempatkan jajaran komisaris dan direksi, serta perangkat tata kelola perusahaan yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi dalam menjalankan BUMN dan BUMD tersebut agar tidak menyalahgunakan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah. Begitu pula dengan perusahaan non-BUMN, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan perlu senantiasa mengawasi perusahaan-perusahaan yang sahamnya telah dimiliki oleh publik guna melindungi kepentingan pemegang saham publik.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat terkait dengan praktik penghindaran pajak. Bagi masyarakat yang merupakan investor pada perusahaan publik yang memiliki koneksi politik dan kepentingan asing, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasinya terutama senantiasa memperhatikan laporan keuangan dan aksi korporasi dari perusahaan yang bersangkutan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif maupun tambahan referensi bagi pengembangan penelitian tentang penghindaran pajak di masa mendatang. Hingga penelitian ini diselesaikan, peneliti belum menemukan penelitian dengan model penelitian yang menggunakan variabel serupa. Oleh karena itu, penelitian

ini diharapkan masih dapat dikembangkan lebih lanjut, baik oleh peneliti pribadi, maupun peneliti lainnya.

5.3 Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini tentunya masih jauh dari sempurna dan masih terdapat keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti, diantaranya ialah:

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa variabel-variabel yang digunakan hanya menjelaskan sebagian kecil model penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan observasi lebih lanjut untuk mendapatkan variabel yang tepat untuk model penelitian ini.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menentukan terlebih dahulu kriteria koneksi politik yang akan digunakan secara jelas agar dapat lebih menggambarkan koneksi politik yang ada pada suatu perusahaan.
3. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan pengukuran lain untuk menggambarkan variabel transaksi pihak berelasi dan penghindaran pajak selain yang digunakan pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. M. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Aswaja Pressindo.
- Andikaningprang, A., Pratomo, D., & Kurnia. (2017). Pengaruh Foreign Investors' Interests dengan Variabel Kontrol Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *E-Proceeding of Management*, 4(2), 1521–1526.
- Barker, J., Asare, K., & Brickman, S. (2017). Transfer Pricing as a Vehicle in Corporate Tax Avoidance. *Journal of Applied Business Research*, 33(1), 9–16.
- Cen, L., Maydew, E. L., Zhang, L., & Zuo, L. (2017). Customer–supplier Relationships and Corporate Tax Avoidance. *Journal of Financial Economics*, 123(2), 377–394. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2016.09.009>
- Chen, Z., Dyreng, S., & Li, B. (2018). Corporate Political Contributions and Tax Avoidance. *Ssrn*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2403918>
- Cristea, A. D., & Nguyen, D. X. (2017). Transfer Pricing by Multinational Firms : New Evidence from Foreign Firm Ownerships. *American Economic Journal*, 8(3), 170–202.
- Dharma, I. M. S., & Ardiana, P. A. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(1), 584–613.
- Faccio, M. (2006). Politically connected firms. *American Economic Review*, 96(1), 369–386.
- Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Political Connection, Foreign Activity, dan Real Earnings Management terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1601–1624. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9223>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, S. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 6, 1–12. <https://doi.org/>. Accessed On March 15, 2017
- Gunadi. (2012). *Akuntansi Pajak*. Grasindo.
- Habib, A., Haris, A., & Jiang, H. (2017). Political Connections, Related Party Transactions: Evidence from Indonesia. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 13(1), 1–19. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2017.01.004>
- Hanny, R. Y., & Niandari, N. (2018). Tax Avoidance Practice : Political Connection , Firm Characteristics and Audit Quality Test at Banking Industry in Indonesia. *International Journal of Business Management and Economic Research*, 9(3),

1296–1303.

- Hidayati, W., & Diyanty, V. (2018). Pengaruh Moderasi Koneksi Politik terhadap Kepemilikan Keluarga dan Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 22(1), 46–60. <http://jurnal.uui.ac.id/JAAI/article/view/9871>
- Idzni, I. N., & Purwanto, A. (2017). Pengaruh Ketertarikan Investor Asing dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), 1–12.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen* (1st ed.). BPFE.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial and Economics*, 3(1), 305–360.
- Kim, C. (Francis), & Zhang, L. (2016). Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78–114. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2303836>
- Kiswanto, N., & Purwaningsih, A. (2014). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2010-2013. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Universitas Atma Jaya*, 16(1), 1–15. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Kusumasari, R. D., Fadilah, S., & Sukarmanto, E. (2018). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). *Prosiding Akuntansi*, 4(2), 766–774.
- Latan, H., & Ghozali, I. (2012). *Partial Least Squares Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 2.0M3*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lin, K. Z., Mills, L. F., Hang, F., & Li, Y. (2017). Do Political Connections Weaken Tax Enforcement Effectiveness? *Contemporary Accounting Research*, 12(10), 3218–3221. <https://doi.org/10.1111/ijlh.12426>
- Lutfia, A., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance. *E-Proceeding of Management*, 5(2), 2386–2394.
- Meinarto, D. P. (2018). Evaluasi atas Perlakuan Perpajakan terhadap Transaksi Transfer Pricing pada Perusahaan Multinasional di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 31–47.
- Messier, W. F., Glover, S. M., & Prawit, D. F. (2014). *Jasa Audit dan Assurance: Pendekatan Sistematis*. Salemba Empat Terjemahan dari: McGraw-Hill Irwin.
- Muhammadi, A. H., Ahmed, Z., & Habib, A. (2016). Multinational Transfer Pricing of Intangible Assets: Indonesian Tax Auditors' Perspectives. *Asian Review of Accounting*, 24(3), 313–337. <https://doi.org/10.1108/ARA-10-2014-0112>

- Nurjanah, I., Isnawati, H., & Sondakh, A. G. (2016). Faktor Determinan Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Simposium Nasional Akuntansi 19*.
- Oktavia, O., & Martani, D. (2013). Tingkat Pengungkapan dan Penggunaan Derivatif Keuangan dalam Aktivitas Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 10(2), 129–146. <https://doi.org/10.21002/jaki.2013.07>
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 105–114. <http://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK/article/view/15916>
- Park, S. (2018). Related Party Transactions and Tax Avoidance of Business Groups. *Sustainability (Switzerland)*, 10(10). <https://doi.org/10.3390/su10103571>
- Park, S. J., Park, W. J., Sun, E. ung, & Woo, S. (2016). Is Foreign Direct Investment Effective from The Perspective of Tax Avoidance? An Analysis of Tax Avoidance through The International Transfer Pricing Behaviors of Korean Corporations. *The Journal of Applied Business Research*, 32(3), 917–935.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Pranoto, B. A., & Widagdo, A. K. (2015). Pengaruh Koneksi Politik Dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 7(1), 472–486.
- Purnomo, L. C. (2016). Pengaruh Struktur Kepemilikan Perusahaan terhadap Tindakan Pajak Agresif. *Jurnal BPPK*, 9(1), 99–108.
- Refgia, T. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 4(1).
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2017). Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness: Empirical Evidence from Australian Firms. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 9(2), 136–150. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2013.06.002>
- Richardson, G., Wang, B., & Zhang, X. (2016). Ownership Structure and Corporate Tax Avoidance: Evidence from Publicly Listed Private Firms in China. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 12(2), 141–158. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2016.06.003>
- Rusydi, M. K., & Martani, D. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Aggressive Tax Avoidance. *Simposium Nasional Akuntansi 17*, 1(1), 1–19.
- Salihu, I. A., Annuar, H. A., Normala, S., & Obid, S. (2015). Foreign Investors' Interests and Corporate Tax Avoidance: Evidence from An Emerging Economy. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 11(2), 138–147. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2015.03.001>

- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2), 85–98. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>
- Sanjaya, I. P. S. (2010). Efek Entrenchment dan Alignment pada Manajemen Laba. *Simposium Nasional Akuntansi 13*, 1(1), 1–26.
- Septiyani, R. P. P., Ramadhanti, W., & Sudibyo, Y. A. (2018). Some Factors That Affect Transfer Pricing Decision. *Soedirman Accounting Review*, 03(01). <http://jos.unsoed.ac.id/index.php/sar/article/view/1158>
- Soemitro, R., & Sugiharti, D. K. (2014). *Asas dan Dasar Perpajakan* (2nd ed.). Refika Aditama.
- Stephanie, Sistomo, & Simanjuntak, R. P. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di BEI. *Fundamental Management*, 2(1), 63–69.
- Sudibyo, Y. A., & Jianfu, S. (2017). Political Connections, State Owned Enterprises and Tax Avoidance : An Evidence from Indonesia. *Corporate Ownership & Control*, 13(January 2016), 279–283. <https://doi.org/10.22495/cocv13i3c2p2>
- Sundari, B., & Susanti, Y. (2016). Transfer Pricing Practices: Empirical Evidence from Manufacturing Companies in Indonesia. *Asia-Pasific Management Accounting Journal*, 11(2), 25–39.
- Tiwa, E. M., Saerang, D. P. E., & Tirayoh, V. Z. (2017). Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing terhadap Penerapan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015. *Jurnal EMBA*, 5(2), 2666–26675. <https://doi.org/10.1163/ILWO-IIIL46>
- Wahab, E. A. A., Arif, A. M., Marzuki, M. M., & Sanusi, Z.-M. (2017). Political Connections, Corporate Governance, and Tax Aggressiveness in Malaysia. In *Asian Review of Accounting* (Vol. 23, Issue 3). <https://doi.org/10.1108/ARA-04-2012-0017>
- Wahab, E. A. A., Ariff, A. M., Marzuki, M. M., & Sanusi, Z. M. (2017). Political Connections, Corporate Governance, and Tax Aggressiveness in Malaysia. In *Asian Review of Accounting* (Vol. 23, Issue 3). <https://doi.org/10.1108/ARA-04-2012-0017>
- Wicaksono, A. P. N. (2017). Koneksi Politik dan Aggresivitas Pajak: Fenomena di Indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(1), 167–180. <https://doi.org/10.15408/akt.v10i1.5833>
- Wijayanti, A., Wijayanti, A., & Samrotun, Y. C. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG dan CSR terhadap Penghindaran Pajak. *Seminar Nasional IENACO*, 541–548. <https://doi.org/10.1029/2008JF001135>
- Ying, T., Wright, B., & Huang, W. (2017). Ownership Structure and Tax Aggressiveness of Chinese Listed Companies. *International Journal of Accounting and Information Management*, 25(3), 313–332.

<https://doi.org/10.1108/IJAIM-07-2016-0070>

Zeng, T. (2018). Relationship between Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance: International Evidence. *Social Responsibility Journal*. <https://doi.org/10.1108/SRJ-03-2018-0056>

Zheng, S. (2017). Can Corporate Diversification Induce More Tax Avoidance? *Journal of Multinational Financial Management*, 41, 47–60. <https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2017.05.008>

Zubaidah, L., & Satyawati, M. D. (2015). *Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Non Keuangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2015*. 1–22.



LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Nama Perusahaan Publik (“Emiten”) Sampel Penelitian

No.	Nama Emiten	Kode Emiten
1	PT Akasha Wira International Tbk	ADES
2	PT Polychem Indonesia Tbk	ADMG
3	PT Argha Karya Prima Industry Tbk	AKPI
4	PT Alkindo Naratama Tbk	ALDO
5	PT Alakasa Industrindo Tbk	ALKA
6	PT Alumindo Light Metal Industry Tbk	ALMI
7	PT Tri Banyan Tirta Tbk	ALTO
8	PT Asahimas Flat Glass Tbk	AMFG
9	PT Asiaplast Industries Tbk	APLI
10	PT Argo Pantes Tbk	ARGO
11	PT Arwana Citramulia Tbk	ARNA
12	PT Astra International Tbk	ASII
13	PT Astra Otoparts Tbk	AUTO
14	PT Saranacentral Bajatama Tbk	BAJA
15	PT Sepatu Bata Tbk	BATA
16	PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk	BIMA
17	PT Indo Kordsa Tbk	BRAM
18	PT Berlina Tbk	BRNA
19	PT Barito Pacific Tbk	BRPT
20	PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk	BTEK
21	PT Betonjaya Manunggal Tbk	BTON
22	PT Budi Starch & Sweetener Tbk	BUDI
23	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	CEKA
24	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	CPIN
25	PT Central Proteina Prima Tbk	CPRO
26	PT Citra Tubindo Tbk	CTBN
27	PT Delta Djakarta Tbk	DLTA
28	PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk	DPNS
29	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk	DVLA
30	PT Ekadharma International Tbk	EKAD
31	PT Eratex Djaja Tbk	ERTX
32	PT Ever Shine Tex Tbk	ESTI
33	PT Eterindo Wahanatama Tbk	ETWA
34	PT Fajar Surya Wisesa Tbk	FASW
35	PT Lotte Chemical Titan Tbk	FPNI
36	PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk	GDST

No.	Nama Emiten	Kode Emiten
37	PT Goodyear Indonesia Tbk	GDYR
38	PT Gudang Garam Tbk	GGRM
39	PT Gajah Tunggal Tbk	GJTL
40	PT Panasia Indo Resources Tbk	HDTX
41	PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	HMSP
42	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	ICBP
43	PT Champion Pacific Indonesia Tbk	IGAR
44	PT Inti Agri Resources Tbk	IIKP
45	PT Indomobil Sukses Internasional Tbk	IMAS
46	PT Indofarma Tbk	INAF
47	PT Indal Aluminium Industry Tbk	INAI
48	PT Intanwijaya Internasional Tbk	INCI
49	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF
50	PT Indo-Rama Synthetics Tbk	INDR
51	PT Indospring Tbk	INDS
52	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	INKP
53	PT Toba Pulp Lestari Tbk	INRU
54	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	INTP
55	PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk	IPOL
56	PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk	ISSP
57	PT Jembo Cable Company Tbk	JECC
58	PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk	JKSW
59	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	JPFA
60	PT Kimia Farma Tbk	KAEF
61	PT KMI Wire and Cable Tbk	KBLI
62	PT Kabelindo Murni Tbk	KBLM
63	PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk	KBRI
64	PT Kedawung Setia Industrial Tbk	KDSI
65	PT Keramik Indonesia Asosiasi Tbk	KIAS
66	PT Kedaung Indah Can Tbk	KICI
67	PT Kalbe Farma Tbk	KLBF
68	PT Grand Kartech Tbk	KRAH
69	PT Krakatau Steel Tbk	KRAS
70	PT Lion Metal Works Tbk	LION
71	PT Langgeng Makmur Industri Tbk	LMPI
72	PT Lionmesh Prima Tbk	LMSH
73	PT Multi Prima Sejahtera Tbk	LPIN
74	PT Malindo Feedmill Tbk	MAIN
75	PT Multistrada Arah Sarana Tbk	MASA
76	PT Martina Berto Tbk	MBTO
77	PT Merck Tbk	MERK

No.	Nama Emiten	Kode Emiten
78	PT Multi Bintang Indonesia Tbk	MLBI
79	PT Mulia Industrindo Tbk	MLIA
80	PT Mustika Ratu Tbk	MRAT
81	PT Mayora Indah Tbk	MYOR
82	PT Asia Pacific Investama Tbk	MYTX
83	PT Pelat Timah Nusantara Tbk	NIKL
84	PT Pan Brother Tbk	PBRX
85	PT Pelangi Indah Canindo Tbk	PICO
86	PT Asia Pacific Fibers Tbk	POLY
87	PT Prima Alloy Steel Universal Tbk	PRAS
88	PT Prasadha Aneka Niaga Tbk	PSDN
89	PT Sat Nusapersada Tbk	PTSN
90	PT Pyridam Farma Tbk	PYFA
91	PT Ricky Putra Globalindo Tbk	RICY
92	PT Bentoel Internasional Investama Tbk	RMBA
93	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	ROTI
94	PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk	SCCO
95	PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	SIDO
96	PT Sierad Produce Tbk	SIPD
97	PT Sekar Bumi Tbk	SKBM
98	PT Sekar Laut Tbk	SKLT
99	PT Semen Baturaja Tbk	SMBR
100	PT Solusi Bangun Indonesia Tbk	SMCB
101	PT Semen Indonesia Tbk	SMGR
102	PT Selamat Sempurna Tbk	SMSM
103	PT Suparma Tbk	SPMA
104	PT Sri Rejeki Isman Tbk	SRIL
105	PT Indo Acidatama Tbk	SRSN
106	PT Sunson Manufacturer Tbk	SSTM
107	PT Buana Artha Anugerah Tbk	STAR
108	PT Siantar Top Tbk	STTP
109	PT SLJ Global Tbk	SULI
110	PT Tembaga Mulia Semanan Tbk	TBMS
111	PT Mandom Indonesia Tbk	TCID
112	PT Tifico Fiber Indonesia Tbk	TFCO
113	PT Tirta Mahakam Resources Tbk	TIRT
114	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	TKIM
115	PT Surya Toto Indonesia Tbk	TOTO
116	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	TPIA
117	PT Trisula International Tbk	TRIS
118	PT Trias Sentosa Tbk	TRST

No.	Nama Emiten	Kode Emiten
119	PT Tempo Scan Pacific Tbk	TSPC
120	PT Ultrajaya Milk Industry Tbk	ULTJ
121	PT Unggul Indah Cahaya Tbk	UNIC
122	PT Nusantara Inti Corpora Tbk	UNIT
123	PT Unilever Indonesia Tbk	UNVR
124	PT Voksel Electric Tbk	VOKS
125	PT Wismilak Inti Makmur Tbk	WIIM
126	PT Yanaprima Hastapersada Tbk	YPAS



Lampiran 2
Daftar Data Pengukuran dan Variabel Penelitian

Tahun	Kode Emiten	Kepemilikan Pemerintah	Komisaris Politisi	Direktur Politisi	Kepemilikan Asing	Komisaris Asing	Direktur Asing	TPB	ETR x -1
2013	ADES	0,000	0,000	0,000	0,919	0,000	0,000	0,003	-0,060
2014	ADES	0,000	0,000	0,000	0,919	0,000	0,000	0,016	-0,253
2015	ADES	0,000	0,000	0,000	0,919	0,000	0,000	0,012	-0,257
2016	ADES	0,000	0,000	0,000	0,915	0,000	0,000	0,009	-0,092
2017	ADES	0,000	0,000	0,000	0,915	0,000	0,000	0,013	-0,252
2018	ADES	0,000	0,000	0,000	0,915	0,000	0,000	0,017	-0,244
2013	ADMG	0,000	1,000	0,000	0,495	0,000	1,000	0,313	-0,866
2014	ADMG	0,000	1,000	0,000	0,495	0,000	1,000	0,396	-0,278
2015	ADMG	0,000	1,000	0,000	0,495	0,000	1,000	0,469	-0,165
2016	ADMG	0,000	1,000	0,000	0,495	0,000	1,000	0,441	-0,268
2017	ADMG	0,000	1,000	0,000	0,495	0,000	1,000	0,370	-0,265
2018	ADMG	0,000	1,000	0,000	0,495	0,000	1,000	0,104	-0,591
2013	AKPI	0,000	0,000	0,000	0,501	0,000	0,000	0,000	-0,479
2014	AKPI	0,000	0,000	0,000	0,501	0,000	0,000	0,000	-0,433
2015	AKPI	0,000	0,000	0,000	0,501	0,000	0,000	0,000	-0,459
2016	AKPI	0,000	0,000	0,000	0,501	0,000	0,000	0,001	-0,310
2017	AKPI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,581
2018	AKPI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,300
2013	ALDO	0,000	0,000	0,000	0,039	0,000	0,000	0,000	-0,252
2014	ALDO	0,000	0,000	0,000	0,041	0,000	0,000	0,004	-0,253
2015	ALDO	0,000	0,000	0,000	0,041	0,000	0,000	0,028	-0,258

Tahun	Kode Emiten	Kepemilikan Pemerintah	Komisaris Politisi	Direktur Politisi	Kepemilikan Asing	Komisaris Asing	Direktur Asing	TPB	ETR x -1
2016	ALDO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,035	-0,255
2017	ALDO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,046	-0,248
2018	ALDO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,376	-0,257
2013	ALKA	0,000	0,000	0,000	0,791	0,000	0,000	0,257	-0,453
2014	ALKA	0,000	0,000	0,000	0,789	0,000	0,000	0,264	-0,324
2015	ALKA	0,000	0,000	0,000	0,789	0,000	0,000	0,606	-3,823
2016	ALKA	0,000	0,000	0,000	0,748	0,000	0,000	0,722	0,866
2017	ALKA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,244	-0,041
2018	ALKA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,018	0,001
2013	ALMI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,374	0,139
2014	ALMI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,493	-0,065
2015	ALMI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,458	-0,274
2016	ALMI	0,000	0,000	0,000	0,003	0,000	0,000	0,569	0,098
2017	ALMI	0,000	0,000	0,000	0,044	0,000	0,000	0,254	0,791
2018	ALMI	0,000	0,000	0,000	0,044	0,000	0,000	0,297	-0,529
2013	ALTO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,779	-0,295
2014	ALTO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,534	-0,004
2015	ALTO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,539	-0,378
2016	ALTO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,439	0,813
2017	ALTO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,047	-0,099
2018	ALTO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,048	-0,277
2013	AMFG	0,000	0,000	0,000	0,439	1,000	1,000	0,598	-0,249
2014	AMFG	0,000	0,000	0,000	0,439	1,000	1,000	0,686	-0,233
2015	AMFG	0,000	0,000	0,000	0,545	1,000	1,000	0,638	-0,265

Tahun	Kode Emiten	Kepemilikan Pemerintah	Komisaris Politisi	Direktur Politisi	Kepemilikan Asing	Komisaris Asing	Direktur Asing	TPB	ETR x -1
2016	AMFG	0,000	0,000	0,000	0,545	1,000	1,000	0,639	-0,253
2017	AMFG	0,000	0,000	0,000	0,534	1,000	1,000	0,588	-0,393
2018	AMFG	0,000	0,000	0,000	0,530	1,000	1,000	0,573	-0,410
2013	APLI	0,000	0,000	0,000	0,277	0,000	0,000	0,000	-0,314
2014	APLI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,421
2015	APLI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,204
2016	APLI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,251
2017	APLI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,341
2018	APLI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,187
2013	ARGO	0,000	1,000	1,000	0,082	0,000	0,000	0,164	0,000
2014	ARGO	0,000	1,000	0,000	0,082	0,000	0,000	0,377	-0,091
2015	ARGO	0,000	1,000	1,000	0,082	0,000	0,000	0,156	-0,071
2016	ARGO	0,000	1,000	1,000	0,082	0,000	0,000	0,203	-0,044
2017	ARGO	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,255	-0,034
2018	ARGO	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,401	-0,098
2013	ARNA	0,000	1,000	0,000	0,365	0,000	0,000	0,941	-0,249
2014	ARNA	0,000	1,000	0,000	0,409	0,000	0,000	0,949	-0,249
2015	ARNA	0,000	1,000	1,000	0,341	0,000	0,000	0,960	-0,254
2016	ARNA	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,955	-0,262
2017	ARNA	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,953	-0,265
2018	ARNA	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,953	-0,253
2013	ASII	0,000	1,000	0,000	0,925	1,000	1,000	0,032	-0,190
2014	ASII	0,000	1,000	0,000	0,932	1,000	1,000	0,035	-0,191
2015	ASII	0,000	1,000	0,000	0,916	1,000	1,000	0,028	-0,205

Tahun	Kode Emiten	Kepemilikan Pemerintah	Komisaris Politisi	Direktur Politisi	Kepemilikan Asing	Komisaris Asing	Direktur Asing	TPB	ETR x -1
2016	ASII	0,000	1,000	0,000	0,920	1,000	1,000	0,025	-0,178
2017	ASII	0,000	1,000	0,000	0,896	1,000	1,000	0,030	-0,207
2018	ASII	0,000	1,000	0,000	0,886	1,000	1,000	0,032	-0,218
2013	AUTO	0,000	0,000	0,000	0,132	1,000	0,000	0,386	-0,174
2014	AUTO	0,000	0,000	0,000	0,140	1,000	0,000	0,368	-0,137
2015	AUTO	0,000	0,000	0,000	0,142	1,000	0,000	0,363	-0,256
2016	AUTO	0,000	0,000	0,000	0,156	1,000	0,000	0,368	-0,255
2017	AUTO	0,000	0,000	0,000	0,156	1,000	0,000	0,377	-0,231
2018	AUTO	0,000	0,000	0,000	0,156	1,000	0,000	0,405	-0,210
2013	BAJA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,022	-0,251
2014	BAJA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,048	-0,279
2015	BAJA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,089	-0,210
2016	BAJA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,055	-0,358
2017	BAJA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,065	-0,197
2018	BAJA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,186	0,069
2013	BATA	0,000	1,000	0,000	0,870	1,000	1,000	0,187	-0,304
2014	BATA	0,000	1,000	0,000	0,871	1,000	1,000	0,556	-0,285
2015	BATA	0,000	1,000	0,000	0,871	1,000	1,000	0,113	-0,091
2016	BATA	0,000	1,000	0,000	0,871	1,000	1,000	0,049	-0,353
2017	BATA	0,000	1,000	0,000	0,871	1,000	1,000	0,096	-0,325
2018	BATA	0,000	1,000	0,000	0,571	1,000	1,000	0,080	-0,268
2013	BIMA	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,249
2014	BIMA	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,242
2015	BIMA	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-2,952

Tahun	Kode Emiten	Kepemilikan Pemerintah	Komisaris Politisi	Direktur Politisi	Kepemilikan Asing	Komisaris Asing	Direktur Asing	TPB	ETR x -1
2016	BIMA	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,417
2017	BIMA	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,449
2018	BIMA	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,261
2013	BRAM	0,000	0,000	0,000	0,602	1,000	1,000	0,042	-0,340
2014	BRAM	0,000	0,000	0,000	0,602	1,000	1,000	0,026	-0,271
2015	BRAM	0,000	0,000	0,000	0,602	1,000	1,000	0,094	-0,312
2016	BRAM	0,000	0,000	0,000	0,601	1,000	1,000	0,081	-0,282
2017	BRAM	0,000	0,000	0,000	0,607	1,000	1,000	0,077	-0,279
2018	BRAM	0,000	0,000	0,000	0,616	1,000	1,000	0,124	-0,285
2013	BRNA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,503
2014	BRNA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,233
2015	BRNA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,949
2016	BRNA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,619
2017	BRNA	0,000	0,000	0,000	0,162	0,000	0,000	0,081	0,205
2018	BRNA	0,000	0,000	0,000	0,162	0,000	0,000	0,066	0,115
2013	BRPT	0,000	0,000	0,000	0,600	0,000	0,000	0,005	0,441
2014	BRPT	0,000	0,000	0,000	0,600	0,000	0,000	0,009	-1,249
2015	BRPT	0,000	0,000	0,000	0,600	0,000	0,000	0,000	-0,854
2016	BRPT	0,000	0,000	0,000	0,600	0,000	0,000	0,000	-0,264
2017	BRPT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,274
2018	BRPT	0,000	0,000	0,000	0,142	0,000	0,000	0,000	-0,434
2013	BTEK	0,000	0,000	0,000	0,127	0,000	1,000	0,000	0,024
2014	BTEK	0,000	0,000	0,000	0,123	0,000	1,000	0,000	-0,041
2015	BTEK	0,000	0,000	0,000	0,127	0,000	1,000	0,000	-0,290

Tahun	Kode Emiten	Kepemilikan Pemerintah	Komisaris Politisi	Direktur Politisi	Kepemilikan Asing	Komisaris Asing	Direktur Asing	TPB	ETR x -1
2016	BTEK	0,000	0,000	0,000	0,735	0,000	0,000	0,000	-0,039
2017	BTEK	0,000	0,000	0,000	0,735	0,000	0,000	0,000	0,042
2018	BTEK	0,000	0,000	0,000	0,475	0,000	0,000	0,000	-0,022
2013	BTON	0,000	0,000	0,000	0,799	0,000	0,000	0,000	-0,222
2014	BTON	0,000	0,000	0,000	0,799	0,000	0,000	0,000	-0,203
2015	BTON	0,000	0,000	0,000	0,799	0,000	0,000	0,000	-0,190
2016	BTON	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,027	-0,273
2017	BTON	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,228
2018	BTON	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,188
2013	BUDI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,724	0,113
2014	BUDI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,821	-0,345
2015	BUDI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,868	-0,596
2016	BUDI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,752	-0,269
2017	BUDI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,758	-0,251
2018	BUDI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,834	-0,297
2013	CEKA	0,000	1,000	0,000	0,870	0,000	0,000	0,613	-0,248
2014	CEKA	0,000	1,000	0,000	0,870	0,000	0,000	0,629	-0,282
2015	CEKA	0,000	1,000	0,000	0,870	0,000	0,000	0,659	-0,251
2016	CEKA	0,000	1,000	0,000	0,870	0,000	0,000	0,464	-0,126
2017	CEKA	0,000	1,000	0,000	0,870	0,000	0,000	0,224	-0,250
2018	CEKA	0,000	1,000	0,000	0,870	0,000	0,000	0,497	-0,249
2013	CPIN	0,000	1,000	0,000	0,353	0,000	1,000	0,036	-0,267
2014	CPIN	0,000	1,000	0,000	0,354	0,000	1,000	0,043	-0,171
2015	CPIN	0,000	1,000	0,000	0,365	0,000	1,000	0,088	-0,197

Tahun	Kode Emiten	Kepemilikan Pemerintah	Komisaris Politisi	Direktur Politisi	Kepemilikan Asing	Komisaris Asing	Direktur Asing	TPB	ETR x -1
2016	CPIN	0,000	1,000	0,000	0,357	0,000	1,000	0,046	-0,435
2017	CPIN	0,000	1,000	0,000	0,366	0,000	1,000	0,047	-0,233
2018	CPIN	0,000	1,000	0,000	0,370	0,000	1,000	0,019	-0,230
2013	CPRO	0,000	1,000	0,000	0,066	0,000	0,000	0,019	0,252
2014	CPRO	0,000	1,000	0,000	0,066	0,000	0,000	0,013	0,048
2015	CPRO	0,000	1,000	0,000	0,295	0,000	0,000	0,022	0,376
2016	CPRO	0,000	1,000	0,000	0,243	0,000	0,000	0,018	-0,157
2017	CPRO	0,000	1,000	0,000	0,457	0,000	0,000	0,025	0,051
2018	CPRO	0,000	1,000	0,000	0,631	1,000	0,000	0,033	-0,060
2013	CTBN	0,000	1,000	1,000	0,825	1,000	1,000	0,539	-0,283
2014	CTBN	0,000	1,000	1,000	0,825	1,000	1,000	0,354	-0,266
2015	CTBN	0,000	1,000	1,000	0,887	1,000	1,000	0,216	-0,018
2016	CTBN	0,000	1,000	0,000	0,887	1,000	1,000	0,510	-0,058
2017	CTBN	0,000	1,000	0,000	0,887	1,000	1,000	0,285	-0,231
2018	CTBN	0,000	1,000	0,000	0,887	1,000	1,000	0,290	-0,223
2013	DLTA	0,263	1,000	0,000	0,583	1,000	1,000	0,014	-0,245
2014	DLTA	0,263	1,000	0,000	0,583	1,000	1,000	0,001	-0,241
2015	DLTA	0,263	1,000	0,000	0,583	1,000	1,000	0,001	-0,232
2016	DLTA	0,263	1,000	0,000	0,583	1,000	1,000	0,001	-0,222
2017	DLTA	0,263	1,000	0,000	0,583	1,000	1,000	0,000	-0,242
2018	DLTA	0,263	1,000	0,000	0,583	1,000	1,000	0,001	-0,234
2013	DPNS	0,000	0,000	0,000	0,152	0,000	0,000	0,000	-0,235
2014	DPNS	0,000	0,000	0,000	0,085	0,000	0,000	0,076	-0,155
2015	DPNS	0,000	0,000	0,000	0,087	0,000	0,000	0,086	-0,167

Tahun	Kode Emiten	Kepemilikan Pemerintah	Komisaris Politisi	Direktur Politisi	Kepemilikan Asing	Komisaris Asing	Direktur Asing	TPB	ETR x -1
2016	DPNS	0,000	0,000	0,000	0,087	0,000	0,000	0,111	-0,185
2017	DPNS	0,000	0,000	0,000	0,087	0,000	0,000	0,076	-0,212
2018	DPNS	0,000	0,000	0,000	0,155	0,000	0,000	0,073	-0,240
2013	DVLA	0,000	1,000	0,000	0,927	1,000	1,000	0,151	-0,284
2014	DVLA	0,000	1,000	0,000	0,927	1,000	1,000	0,133	-0,236
2015	DVLA	0,000	1,000	0,000	0,927	1,000	1,000	0,082	-0,253
2016	DVLA	0,000	1,000	0,000	0,921	1,000	1,000	0,046	-0,291
2017	DVLA	0,000	1,000	0,000	0,921	1,000	1,000	0,065	-0,283
2018	DVLA	0,000	1,000	0,000	0,925	1,000	1,000	0,029	-0,265
2013	EKAD	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,006	-0,241
2014	EKAD	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	-0,306
2015	EKAD	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004	-0,291
2016	EKAD	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004	-0,234
2017	EKAD	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	-0,258
2018	EKAD	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	-0,270
2013	ERTX	0,000	0,000	0,000	0,473	1,000	1,000	0,000	-0,202
2014	ERTX	0,000	0,000	0,000	0,473	1,000	1,000	0,000	0,000
2015	ERTX	0,000	0,000	0,000	0,389	1,000	1,000	0,000	0,000
2016	ERTX	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	-0,282
2017	ERTX	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	-0,016
2018	ERTX	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	-0,167
2013	ESTI	0,000	0,000	0,000	0,136	0,000	0,000	0,000	-0,238
2014	ESTI	0,000	0,000	0,000	0,136	0,000	0,000	0,000	-0,171
2015	ESTI	0,000	0,000	0,000	0,136	0,000	0,000	0,000	0,502

Tahun	Kode Emiten	Kepemilikan Pemerintah	Komisaris Politisi	Direktur Politisi	Kepemilikan Asing	Komisaris Asing	Direktur Asing	TPB	ETR x -1
2016	ESTI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,016
2017	ESTI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,230
2018	ESTI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,053
2013	ETWA	0,000	0,000	0,000	0,482	1,000	0,000	0,101	-0,748
2014	ETWA	0,000	0,000	0,000	0,482	1,000	0,000	0,314	-0,160
2015	ETWA	0,000	0,000	0,000	0,482	0,000	0,000	0,029	0,037
2016	ETWA	0,000	0,000	0,000	0,482	0,000	0,000	0,009	-0,252
2017	ETWA	0,000	0,000	0,000	0,482	0,000	0,000	0,000	0,092
2018	ETWA	0,000	0,000	0,000	0,482	0,000	0,000	0,000	-0,071
2013	FASW	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	-0,244
2014	FASW	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,314
2015	FASW	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,233
2016	FASW	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,059
2017	FASW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,021	-0,277
2018	FASW	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,094	-0,293
2013	FPNI	0,000	1,000	0,000	0,952	1,000	1,000	0,534	-0,096
2014	FPNI	0,000	1,000	0,000	0,952	1,000	1,000	0,400	-0,580
2015	FPNI	0,000	1,000	0,000	0,952	1,000	1,000	0,400	-0,580
2016	FPNI	0,000	1,000	0,000	0,904	1,000	1,000	0,386	-0,506
2017	FPNI	0,000	1,000	0,000	0,904	1,000	1,000	0,418	-0,209
2018	FPNI	0,000	0,000	0,000	0,904	1,000	1,000	0,348	-0,285
2013	GDST	0,000	0,000	0,000	0,873	1,000	1,000	0,221	-0,244
2014	GDST	0,000	0,000	0,000	0,873	1,000	1,000	0,191	-0,263
2015	GDST	0,000	0,000	0,000	0,873	1,000	1,000	0,344	-0,247

Tahun	Kode Emiten	Kepemilikan Pemerintah	Komisaris Politisi	Direktur Politisi	Kepemilikan Asing	Komisaris Asing	Direktur Asing	TPB	ETR x -1
2016	GDST	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,328	-0,303
2017	GDST	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,261	-0,531
2018	GDST	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,296	0,306
2013	GDYR	0,000	0,000	0,000	0,850	1,000	1,000	0,778	-0,302
2014	GDYR	0,000	0,000	0,000	0,850	1,000	1,000	0,789	-0,417
2015	GDYR	0,000	0,000	0,000	0,850	1,000	1,000	0,648	-1,074
2016	GDYR	0,000	0,000	0,000	0,850	1,000	1,000	0,685	-0,355
2017	GDYR	0,000	0,000	0,000	0,850	1,000	1,000	0,672	2,363
2018	GDYR	0,000	0,000	0,000	0,850	1,000	1,000	0,748	-0,509
2013	GGRM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,261
2014	GGRM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,251
2015	GGRM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,253
2016	GGRM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,253
2017	GGRM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,268	-0,257
2018	GGRM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,256
2013	GJTL	0,000	1,000	0,000	0,597	1,000	1,000	0,339	-0,277
2014	GJTL	0,000	1,000	0,000	0,595	1,000	1,000	0,350	-0,315
2015	GJTL	0,000	1,000	0,000	0,595	1,000	1,000	0,390	-0,056
2016	GJTL	0,000	1,000	0,000	0,595	1,000	1,000	0,516	-0,241
2017	GJTL	0,000	1,000	0,000	0,605	1,000	1,000	0,488	-0,578
2018	GJTL	0,000	1,000	1,000	0,605	1,000	1,000	0,366	-0,129
2013	HDTX	0,000	0,000	0,000	0,695	0,000	0,000	0,162	-0,269
2014	HDTX	0,000	0,000	0,000	0,452	0,000	0,000	0,150	-0,038
2015	HDTX	0,000	0,000	0,000	0,767	0,000	0,000	0,280	-0,014

[illegible]

Tahun	Kode Emiten	Kepemilikan Pemerintah	Komisaris Politisi	Direktur Politisi	Kepemilikan Asing	Komisaris Asing	Direktur Asing	TPB	ETR x -1
2016	INCI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,340	-0,249
2017	INCI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,243	-0,250
2018	INCI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,122	-0,243
2013	INDF	0,000	0,000	0,000	0,501	1,000	0,000	0,111	-0,294
2014	INDF	0,000	0,000	0,000	0,501	1,000	0,000	0,197	-0,293
2015	INDF	0,000	0,000	0,000	0,501	1,000	0,000	0,222	-0,349
2016	INDF	0,000	0,000	0,000	0,501	1,000	0,000	0,242	-0,343
2017	INDF	0,000	0,000	0,000	0,501	1,000	0,000	0,216	-0,328
2018	INDF	0,000	0,000	0,000	0,501	1,000	0,000	0,207	-0,334
2013	INDR	0,000	0,000	0,000	0,102	1,000	1,000	0,019	-0,813
2014	INDR	0,000	0,000	0,000	0,102	1,000	1,000	0,049	-0,485
2015	INDR	0,000	0,000	0,000	0,102	1,000	1,000	0,023	-1,918
2016	INDR	0,000	0,000	0,000	0,332	1,000	1,000	0,123	-0,771
2017	INDR	0,000	0,000	0,000	0,287	1,000	1,000	0,162	-0,810
2018	INDR	0,000	0,000	0,000	0,340	1,000	1,000	0,094	-0,126
2013	INDS	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,067	-0,200
2014	INDS	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,049	-0,238
2015	INDS	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,051	-0,532
2016	INDS	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,109	-0,176
2017	INDS	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,053	-0,291
2018	INDS	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,075	-0,252
2013	INKP	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,638	-0,069
2014	INKP	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,567	-0,001
2015	INKP	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,784	-0,031

[illegible]

Tahun	Kode Emiten	Kepemilikan Pemerintah	Komisaris Politisi	Direktur Politisi	Kepemilikan Asing	Komisaris Asing	Direktur Asing	TPB	ETR x -1
2016	ISSP	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,035	-0,260
2017	ISSP	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,067	-0,577
2018	ISSP	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020	-0,183
2013	JECC	0,000	1,000	0,000	0,200	0,000	1,000	0,209	-0,202
2014	JECC	0,000	1,000	0,000	0,200	0,000	1,000	0,234	-0,280
2015	JECC	0,000	1,000	0,000	0,200	0,000	1,000	0,212	-0,710
2016	JECC	0,000	1,000	0,000	0,200	0,000	1,000	0,168	-0,245
2017	JECC	0,000	1,000	0,000	0,200	0,000	1,000	0,299	-0,253
2018	JECC	0,000	1,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,428	-0,275
2013	JKSW	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,986	0,000
2014	JKSW	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,944	0,000
2015	JKSW	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,976	0,000
2016	JKSW	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,934	1,399
2017	JKSW	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,998	-0,503
2018	JKSW	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,998	0,000
2013	JPFA	0,000	0,000	0,000	0,575	0,000	1,000	0,085	-0,285
2014	JPFA	0,000	0,000	0,000	0,575	0,000	1,000	0,036	-0,291
2015	JPFA	0,000	0,000	0,000	0,580	0,000	1,000	0,038	-0,248
2016	JPFA	0,000	0,000	0,000	0,630	0,000	1,000	0,051	-0,215
2017	JPFA	0,000	0,000	0,000	0,630	0,000	1,000	0,060	-0,364
2018	JPFA	0,000	0,000	0,000	0,641	0,000	1,000	0,051	-0,271
2013	KAEF	0,900	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,113	-0,241
2014	KAEF	0,900	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,031	-0,251
2015	KAEF	0,900	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,081	-0,252

Tahun	Kode Emiten	Kepemilikan Pemerintah	Komisaris Politisi	Direktur Politisi	Kepemilikan Asing	Komisaris Asing	Direktur Asing	TPB	ETR x -1
2016	KDSI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,260
2017	KDSI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,261
2018	KDSI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,262
2013	KIAS	0,000	0,000	0,000	0,963	1,000	1,000	0,964	-0,294
2014	KIAS	0,000	0,000	0,000	0,963	1,000	1,000	0,973	-0,223
2015	KIAS	0,000	0,000	0,000	0,963	1,000	1,000	0,981	-0,213
2016	KIAS	0,000	0,000	0,000	0,963	1,000	1,000	0,982	-0,522
2017	KIAS	0,000	0,000	0,000	0,963	1,000	1,000	0,992	-0,099
2018	KIAS	0,000	0,000	0,000	0,963	1,000	1,000	0,998	-0,167
2013	KICI	0,000	0,000	0,000	0,314	0,000	0,000	0,284	-0,254
2014	KICI	0,000	0,000	0,000	0,314	0,000	0,000	0,327	-0,257
2015	KICI	0,000	0,000	0,000	0,394	0,000	0,000	0,175	-5,796
2016	KICI	0,000	0,000	0,000	0,394	0,000	0,000	0,159	-0,372
2017	KICI	0,000	0,000	0,000	0,397	0,000	0,000	0,156	-0,253
2018	KICI	0,000	0,000	0,000	0,445	0,000	0,000	0,259	-0,215
2013	KLBF	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,009	-0,234
2014	KLBF	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,009	-0,233
2015	KLBF	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007	-0,244
2016	KLBF	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,010	-0,239
2017	KLBF	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,008	-0,243
2018	KLBF	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,008	-0,245
2013	KRAH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	-0,294
2014	KRAH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	-0,232
2015	KRAH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	-0,037

Tahun	Kode Emiten	Kepemilikan Pemerintah	Komisaris Politisi	Direktur Politisi	Kepemilikan Asing	Komisaris Asing	Direktur Asing	TPB	ETR x -1
2016	KRAH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	-0,813
2017	KRAH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,021
2018	KRAH	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,004
2013	KRAS	0,800	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,468	-0,078
2014	KRAS	0,800	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,489	-0,142
2015	KRAS	0,800	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,490	-0,020
2016	KRAS	0,800	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,415	-0,074
2017	KRAS	0,800	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,304	0,046
2018	KRAS	0,800	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,834	-0,052
2013	LION	0,000	0,000	0,000	0,577	1,000	1,000	0,262	-0,238
2014	LION	0,000	0,000	0,000	0,577	1,000	1,000	0,134	-0,220
2015	LION	0,000	0,000	0,000	0,577	1,000	1,000	0,221	-0,213
2016	LION	0,000	0,000	0,000	0,577	1,000	1,000	0,742	-0,225
2017	LION	0,000	0,000	0,000	0,577	1,000	1,000	0,182	-0,540
2018	LION	0,000	0,000	0,000	0,577	1,000	1,000	0,176	-0,386
2013	LMPI	0,000	0,000	0,000	0,598	0,000	0,000	0,004	-0,141
2014	LMPI	0,000	0,000	0,000	0,598	0,000	0,000	0,006	-0,430
2015	LMPI	0,000	0,000	0,000	0,598	0,000	0,000	0,004	-0,423
2016	LMPI	0,000	0,000	0,000	0,598	0,000	0,000	0,005	-0,380
2017	LMPI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007	-0,100
2018	LMPI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,020	-0,212
2013	LMSH	0,000	0,000	0,000	0,322	1,000	0,000	0,000	-0,260
2014	LMSH	0,000	0,000	0,000	0,322	1,000	0,000	0,000	-0,327
2015	LMSH	0,000	0,000	0,000	0,322	1,000	0,000	0,000	-0,489

[illegible]

Tahun	Kode Emiten	Kepemilikan Pemerintah	Komisaris Politisi	Direktur Politisi	Kepemilikan Asing	Komisaris Asing	Direktur Asing	TPB	ETR x -1
2017	MBTO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,946	-0,220
2018	MBTO	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,908	-0,264
2013	MERK	0,000	0,000	0,000	0,916	1,000	1,000	0,000	-0,252
2014	MERK	0,000	0,000	0,000	0,904	1,000	1,000	0,006	-0,267
2015	MERK	0,000	0,000	0,000	0,867	1,000	1,000	0,000	-0,265
2016	MERK	0,000	0,000	0,000	0,867	1,000	1,000	0,000	-0,284
2017	MERK	0,000	0,000	0,000	0,867	1,000	1,000	0,008	-0,297
2018	MERK	0,000	0,000	0,000	0,867	1,000	1,000	0,000	-0,256
2013	MLBI	0,000	0,000	0,000	0,837	1,000	1,000	0,001	-0,257
2014	MLBI	0,000	0,000	0,000	0,818	1,000	1,000	0,000	-0,263
2015	MLBI	0,000	0,000	0,000	0,818	1,000	1,000	0,007	-0,264
2016	MLBI	0,000	0,000	0,000	0,818	1,000	1,000	0,009	-0,256
2017	MLBI	0,000	0,000	0,000	0,818	1,000	1,000	0,021	-0,257
2018	MLBI	0,000	0,000	0,000	0,818	1,000	1,000	0,001	-0,267
2013	MLIA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,120	0,068
2014	MLIA	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,038	-0,235
2015	MLIA	0,000	0,000	0,000	0,083	1,000	1,000	0,009	-0,180
2016	MLIA	0,000	0,000	0,000	0,156	1,000	1,000	0,005	-2,018
2017	MLIA	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,035	-0,064
2018	MLIA	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	0,052	-0,286
2013	MRAT	0,000	0,000	0,000	0,090	0,000	0,000	0,000	-0,331
2014	MRAT	0,000	0,000	0,000	0,090	0,000	0,000	0,000	-0,266
2015	MRAT	0,000	0,000	0,000	0,090	0,000	0,000	0,000	-0,536
2016	MRAT	0,000	0,000	0,000	0,090	0,000	0,000	0,000	0,359

Tahun	Kode Emiten	Kepemilikan Pemerintah	Komisaris Politisi	Direktur Politisi	Kepemilikan Asing	Komisaris Asing	Direktur Asing	TPB	ETR x -1
2017	MRAT	0,000	0,000	0,000	0,089	0,000	0,000	0,000	-0,053
2018	MRAT	0,000	0,000	0,000	0,089	0,000	0,000	0,000	-2,202
2013	MYOR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,729	-0,253
2014	MYOR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,633	-0,226
2015	MYOR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,629	-0,238
2016	MYOR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,645	-0,248
2017	MYOR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,782	-0,254
2018	MYOR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,763	-0,261
2013	MYTX	0,000	1,000	1,000	0,588	0,000	0,000	0,005	1,201
2014	MYTX	0,000	1,000	1,000	0,588	0,000	0,000	0,257	-0,167
2015	MYTX	0,000	1,000	1,000	0,588	0,000	0,000	0,358	-0,208
2016	MYTX	0,000	0,000	0,000	0,588	0,000	0,000	0,241	-0,104
2017	MYTX	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,472	-0,075
2018	MYTX	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	-0,115
2013	NIKL	0,000	1,000	0,000	0,550	1,000	1,000	0,000	-0,447
2014	NIKL	0,000	1,000	0,000	0,550	1,000	1,000	0,000	0,046
2015	NIKL	0,000	1,000	0,000	0,550	1,000	1,000	0,000	0,272
2016	NIKL	0,000	1,000	0,000	0,550	1,000	1,000	0,000	0,033
2017	NIKL	0,000	1,000	0,000	0,550	1,000	1,000	0,000	-0,057
2018	NIKL	0,000	1,000	0,000	0,550	1,000	1,000	0,000	-0,125
2013	PBRX	0,000	0,000	0,000	0,142	0,000	1,000	0,040	-0,180
2014	PBRX	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,134	-0,217
2015	PBRX	0,000	0,000	0,000	0,054	0,000	1,000	0,026	-0,250
2016	PBRX	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,015	-0,273

Tahun	Kode Emiten	Kepemilikan Pemerintah	Komisaris Politisi	Direktur Politisi	Kepemilikan Asing	Komisaris Asing	Direktur Asing	TPB	ETR x -1
2017	PBRX	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,021	-0,286
2018	PBRX	0,000	0,000	0,000	0,060	0,000	1,000	0,012	-0,209
2013	PICO	0,000	0,000	0,000	0,762	0,000	0,000	0,767	-0,264
2014	PICO	0,000	0,000	0,000	0,762	0,000	0,000	0,829	-0,210
2015	PICO	0,000	0,000	0,000	0,762	0,000	0,000	0,930	-0,142
2016	PICO	0,000	0,000	0,000	0,762	0,000	0,000	0,919	-0,205
2017	PICO	0,000	0,000	0,000	0,480	0,000	0,000	0,787	-0,467
2018	PICO	0,000	0,000	0,000	0,480	0,000	0,000	0,795	-0,116
2013	POLY	0,000	1,000	0,000	0,577	1,000	1,000	0,459	-0,176
2014	POLY	0,000	1,000	0,000	0,579	1,000	1,000	0,504	-0,021
2015	POLY	0,000	1,000	0,000	0,579	1,000	1,000	0,532	0,527
2016	POLY	0,000	1,000	0,000	0,579	1,000	1,000	0,000	0,701
2017	POLY	0,000	1,000	0,000	0,579	1,000	1,000	0,000	3,481
2018	POLY	0,000	1,000	0,000	0,579	1,000	1,000	0,000	-0,159
2013	PRAS	0,000	0,000	0,000	0,161	0,000	0,000	0,002	-0,165
2014	PRAS	0,000	0,000	0,000	0,161	0,000	0,000	0,000	-0,245
2015	PRAS	0,000	0,000	0,000	0,161	0,000	0,000	0,000	-0,240
2016	PRAS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,678
2017	PRAS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,805
2018	PRAS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,221
2013	PSDN	0,000	0,000	0,000	0,547	0,000	0,000	0,040	-0,507
2014	PSDN	0,000	0,000	0,000	0,547	0,000	0,000	0,068	0,327
2015	PSDN	0,000	0,000	0,000	0,547	0,000	0,000	0,129	0,290
2016	PSDN	0,000	0,000	0,000	0,547	0,000	0,000	0,059	2,556

Tahun	Kode Emiten	Kepemilikan Pemerintah	Komisaris Politisi	Direktur Politisi	Kepemilikan Asing	Komisaris Asing	Direktur Asing	TPB	ETR x -1
2017	PSDN	0,000	0,000	0,000	0,078	0,000	0,000	0,000	-0,400
2018	PSDN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,021	1,141
2013	PTSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,279
2014	PTSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,375
2015	PTSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1,198
2016	PTSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,311
2017	PTSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,351
2018	PTSN	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,268
2013	PYFA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,271
2014	PYFA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,368
2015	PYFA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,322
2016	PYFA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,270
2017	PYFA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,258
2018	PYFA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,254
2013	RICY	0,000	0,000	0,000	0,326	0,000	0,000	0,054	-0,462
2014	RICY	0,000	0,000	0,000	0,326	0,000	0,000	0,172	-0,332
2015	RICY	0,000	0,000	0,000	0,326	0,000	0,000	0,181	-0,399
2016	RICY	0,000	0,000	0,000	0,326	0,000	0,000	0,271	-0,399
2017	RICY	0,000	0,000	0,000	0,326	0,000	0,000	0,250	-0,358
2018	RICY	0,000	0,000	0,000	0,326	0,000	0,000	0,287	-0,462
2013	RMBA	0,000	0,000	0,000	0,990	1,000	1,000	0,009	-0,208
2014	RMBA	0,000	1,000	0,000	0,990	1,000	1,000	0,027	0,334
2015	RMBA	0,000	1,000	0,000	0,990	1,000	1,000	0,040	-0,155
2016	RMBA	0,000	1,000	0,000	0,925	1,000	1,000	0,131	0,499

[illegible]

Tahun	Kode Emiten	Kepemilikan Pemerintah	Komisaris Politisi	Direktur Politisi	Kepemilikan Asing	Komisaris Asing	Direktur Asing	TPB	ETR x -1
2017	SIPD	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,495
2018	SIPD	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,001	-0,237
2013	SKBM	0,000	0,000	0,000	0,592	0,000	0,000	0,076	-0,256
2014	SKBM	0,000	0,000	0,000	0,607	0,000	0,000	0,035	-0,188
2015	SKBM	0,000	0,000	0,000	0,604	0,000	0,000	0,070	-0,251
2016	SKBM	0,000	0,000	0,000	0,605	1,000	0,000	0,081	-0,268
2017	SKBM	0,000	0,000	0,000	0,668	1,000	0,000	0,077	-0,185
2018	SKBM	0,000	0,000	0,000	0,668	1,000	0,000	0,048	-0,236
2013	SKLT	0,000	0,000	0,000	0,574	0,000	0,000	0,039	-0,300
2014	SKLT	0,000	0,000	0,000	0,574	0,000	0,000	0,031	-0,383
2015	SKLT	0,000	0,000	0,000	0,574	0,000	0,000	0,035	-0,267
2016	SKLT	0,000	0,000	0,000	0,574	0,000	0,000	0,029	-0,180
2017	SKLT	0,000	0,000	0,000	0,579	0,000	0,000	0,052	-0,161
2018	SKLT	0,000	0,000	0,000	0,579	0,000	0,000	0,052	-0,192
2013	SMBR	0,762	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,004	-0,220
2014	SMBR	0,762	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,048	-0,168
2015	SMBR	0,762	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,004	-0,201
2016	SMBR	0,762	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,005	-0,258
2017	SMBR	0,756	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030	-0,298
2018	SMBR	0,755	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,056	-0,477
2013	SMCB	0,000	0,000	0,000	0,807	1,000	1,000	0,002	-0,287
2014	SMCB	0,000	0,000	0,000	0,807	1,000	1,000	0,000	-0,336
2015	SMCB	0,000	1,000	0,000	0,807	1,000	1,000	0,010	-0,431
2016	SMCB	0,000	1,000	0,000	0,864	1,000	1,000	0,014	-0,654

[illegible]

[illegible]

Tahun	Kode Emiten	Kepemilikan Pemerintah	Komisaris Politisi	Direktur Politisi	Kepemilikan Asing	Komisaris Asing	Direktur Asing	TPB	ETR x -1
2017	STTP	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,665	-0,251
2018	STTP	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,612	-0,214
2013	SULI	0,000	1,000	0,000	0,337	0,000	0,000	0,000	0,121
2014	SULI	0,000	1,000	0,000	0,321	0,000	0,000	0,000	-0,811
2015	SULI	0,000	1,000	0,000	0,371	0,000	0,000	0,000	-8,816
2016	SULI	0,000	1,000	0,000	0,271	0,000	0,000	0,000	-0,354
2017	SULI	0,000	1,000	0,000	0,329	0,000	0,000	0,000	1,519
2018	SULI	0,000	1,000	0,000	0,281	0,000	0,000	0,000	1,498
2013	TBMS	0,000	0,000	0,000	0,524	1,000	1,000	0,412	-0,129
2014	TBMS	0,000	0,000	0,000	0,524	1,000	1,000	0,386	-0,267
2015	TBMS	0,000	0,000	0,000	0,524	1,000	1,000	0,385	-0,358
2016	TBMS	0,000	0,000	0,000	0,524	1,000	1,000	0,470	-0,252
2017	TBMS	0,000	0,000	0,000	0,524	1,000	1,000	0,378	-0,286
2018	TBMS	0,000	0,000	0,000	0,524	1,000	1,000	0,379	-0,250
2013	TCID	0,000	0,000	0,000	0,608	1,000	1,000	0,968	-0,266
2014	TCID	0,000	0,000	0,000	0,608	1,000	1,000	0,974	-0,272
2015	TCID	0,000	1,000	0,000	0,608	1,000	1,000	0,836	-0,066
2016	TCID	0,000	1,000	0,000	0,608	1,000	1,000	0,876	-0,268
2017	TCID	0,000	1,000	0,000	0,608	1,000	1,000	0,941	-0,263
2018	TCID	0,000	0,000	0,000	0,608	1,000	1,000	0,951	-0,262
2013	TFCO	0,000	1,000	0,000	0,316	0,000	1,000	0,000	-0,066
2014	TFCO	0,000	1,000	0,000	0,316	0,000	1,000	0,000	-0,098
2015	TFCO	0,000	1,000	0,000	0,316	0,000	1,000	0,000	-1,451
2016	TFCO	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,330

Tahun	Kode Emiten	Kepemilikan Pemerintah	Komisaris Politisi	Direktur Politisi	Kepemilikan Asing	Komisaris Asing	Direktur Asing	TPB	ETR x -1
2017	TFCO	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	-0,467
2018	TFCO	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	-4,375
2013	TIRT	0,000	0,000	0,000	0,453	0,000	0,000	0,000	-0,271
2014	TIRT	0,000	0,000	0,000	0,453	0,000	0,000	0,000	-0,033
2015	TIRT	0,000	0,000	0,000	0,453	0,000	0,000	0,000	-2,044
2016	TIRT	0,000	0,000	0,000	0,283	0,000	0,000	0,000	-0,219
2017	TIRT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,571
2018	TIRT	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,036
2013	TKIM	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,863	0,822
2014	TKIM	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	-0,848
2015	TKIM	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,798	-1,125
2016	TKIM	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,724	7,677
2017	TKIM	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,621	-0,232
2018	TKIM	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,573	-0,020
2013	TOTO	0,000	0,000	0,000	0,395	1,000	1,000	0,940	-0,268
2014	TOTO	0,000	0,000	0,000	0,395	1,000	1,000	0,660	-0,231
2015	TOTO	0,000	0,000	0,000	0,379	1,000	1,000	0,963	-0,252
2016	TOTO	0,000	0,000	0,000	0,379	1,000	1,000	0,961	-0,329
2017	TOTO	0,000	0,000	0,000	0,379	1,000	1,000	0,915	-0,261
2018	TOTO	0,000	0,000	0,000	0,379	1,000	1,000	0,956	-0,233
2013	TPIA	0,000	0,000	0,000	0,400	1,000	1,000	0,036	-0,354
2014	TPIA	0,000	0,000	0,000	0,404	1,000	1,000	0,124	-0,268
2015	TPIA	0,000	1,000	0,000	0,507	1,000	1,000	0,000	-0,530
2016	TPIA	0,000	1,000	0,000	0,507	1,000	1,000	0,012	-0,251

Tahun	Kode Emiten	Kepemilikan Pemerintah	Komisaris Politisi	Direktur Politisi	Kepemilikan Asing	Komisaris Asing	Direktur Asing	TPB	ETR x -1
2017	TPIA	0,000	1,000	0,000	0,353	1,000	1,000	0,067	-0,248
2018	TPIA	0,000	1,000	0,000	0,306	1,000	1,000	0,123	-0,282
2013	TRIS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,023	-0,248
2014	TRIS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,014	-0,246
2015	TRIS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,026	-0,254
2016	TRIS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,011	-0,474
2017	TRIS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,018	-0,350
2018	TRIS	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,016	-0,191
2013	TRST	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,194	-0,546
2014	TRST	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,019	-0,523
2015	TRST	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,029	-0,505
2016	TRST	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,028	-0,457
2017	TRST	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,025	2,053
2018	TRST	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,745
2013	TSPC	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	-0,231
2014	TSPC	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	-0,213
2015	TSPC	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	-0,252
2016	TSPC	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,241
2017	TSPC	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	-0,251
2018	TSPC	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	-0,257
2013	ULTJ	0,000	1,000	0,000	0,095	0,000	0,000	0,018	-0,256
2014	ULTJ	0,000	1,000	0,000	0,095	0,000	0,000	0,019	-0,245
2015	ULTJ	0,000	1,000	0,000	0,074	0,000	0,000	0,049	-0,253
2016	ULTJ	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,042	-0,239

Tahun	Kode Emiten	Kepemilikan Pemerintah	Komisaris Politisi	Direktur Politisi	Kepemilikan Asing	Komisaris Asing	Direktur Asing	TPB	ETR x -1
2017	ULTJ	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,307
2018	ULTJ	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,261
2013	UNIC	0,000	1,000	1,000	0,101	0,000	1,000	0,776	-0,455
2014	UNIC	0,000	1,000	1,000	0,101	0,000	1,000	0,783	-0,490
2015	UNIC	0,000	1,000	1,000	0,101	0,000	1,000	0,704	7,493
2016	UNIC	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,758	0,852
2017	UNIC	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,670	-0,324
2018	UNIC	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,536	-0,386
2013	UNIT	0,000	0,000	0,000	0,548	0,000	0,000	0,000	-0,810
2014	UNIT	0,000	0,000	0,000	0,548	0,000	0,000	0,000	-0,930
2015	UNIT	0,000	0,000	0,000	0,548	0,000	0,000	0,000	-0,768
2016	UNIT	0,000	0,000	0,000	0,548	0,000	0,000	0,000	-0,551
2017	UNIT	0,000	0,000	0,000	0,294	0,000	0,000	0,000	-0,310
2018	UNIT	0,000	0,000	0,000	0,294	0,000	0,000	0,000	-0,328
2013	UNVR	0,000	1,000	0,000	0,850	1,000	1,000	0,099	-0,252
2014	UNVR	0,000	1,000	0,000	0,850	0,000	1,000	0,154	-0,252
2015	UNVR	0,000	1,000	0,000	0,850	0,000	1,000	0,178	-0,253
2016	UNVR	0,000	1,000	0,000	0,850	0,000	1,000	0,114	-0,254
2017	UNVR	0,000	1,000	0,000	0,850	0,000	1,000	0,090	-0,253
2018	UNVR	0,000	1,000	0,000	0,850	0,000	1,000	0,105	-0,252
2013	VOKS	0,000	0,000	1,000	0,210	1,000	1,000	0,001	-0,242
2014	VOKS	0,000	0,000	1,000	0,210	1,000	1,000	0,000	-0,244
2015	VOKS	0,000	0,000	1,000	0,210	1,000	1,000	0,097	-0,884
2016	VOKS	0,000	1,000	0,000	0,510	1,000	1,000	0,065	-0,287

[illegible]

Lampiran 3

Model Penelitian

